



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bappebti/Mjl/123/X/2011/Edisi Juni

KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



11 Gudang SRG Diserahkan Bappebti 

Bursa Harus Pikirkan Kontrak Singkong 

Peluang Selenggarakan **PLKA**





DARI REDAKSI

Evaluasi penyelenggaraan pasar lelang yang dilaksanakan di 19 daerah, ternyata masih ditemukan beberapa kendala. Yakni sulitnya berkembang pasar lelang tersebut. Pada hal, potensi komoditi dari daerah tersebut cukup besar. Hal itu terungkap saat 19 Pemda penyelenggara pasar lelang dievaluasi laporannya oleh Bappebti, diacara evaluasi pasar lelang yang dilakukan di Bandung, Jabar, 15 Juni 2011.

Tahun 2009, saat Bappebti melakukan program evaluasi pasar lelang, di Manado, Sulut, sejatinya sudah diketahui ada sebanyak 6 daerah yang masuk dalam zona merah. Artinya, daerah tersebut sudah tidak layak lagi penyelenggara pasar lelang. Daerah yang masuk dalam zona merah ini diindikasikan dari rendahnya nilai transaksi dan rendahnya frekuensi penyelenggaraan pasar lelang.

Daerah yang masuk dalam zona merah tersebut, di tahun 2012 bakal tidak memperoleh dana dekonsentrasi dari Bappebti. Jika, sepanjang tahun 2011 ini tidak menunjukkan performa yang lebih baik. Itulah salah satu kesimpulan dari evaluasi pasar lelang 2011.

Selain itu, untuk menggenjot penyelenggaraan pasar lelang yang berkualitas, masing-masing Pemda juga diminta untuk mengalokasikan anggaran dari APBD, minimal sebesar 35 % dari nilai dana dekonsentrasi APBN yang disalurkan melalui Bappebti. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan frekuensi penyelenggaraan pasar lelang, serta meningkatkan kualitas transaksi.

Di samping itu, revitalisasi pasar lelang yang sudah diprogramkan sejak tahun 2011 di lima wilayah penyelenggara pasar lelang, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali dan Sulawesi Selatan, masih diberi waktu selama tiga tahun untuk berbenah diri.

'Nah, untuk masa mendatang, Bappebti juga membuka kran dan mendorong sekecang-kecangnya bagi

pihak swasta atau koperasi sebagai penyelenggara pasar lelang. Karena pada dasarnya siapa pun bisa menyelenggarakan pasar lelang. Tergantung memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Hingga saat ini dari kalangan swasta atau pun koperasi yang menyelenggarakan pasar lelang baru ada satu, yakni PT. e-Pasar. Perusahaan ini menyelenggarakan pasar lelang melalui teknologi informasi. Dan, telah beroperasi sejak Oktober 2010, lalu. Saat ini pun ada satu dari kalangan swasta yang berminat untuk memasuki pasar lelang. Hanya saja, kelompok swasta yang berbasis di bisnis properti itu masih mempersiapkan peraturan tata tertib pasar lelang serta fasilitas pendukung lainnya.

Implementasi SRG diberbagai daerah juga menjadi salah satu sorotan buletin ini. Pada 12 Juni 2011, lalu di Bali, Bappebti telah menyerahkan gudang SRG kepada 11 Pemda. Dalam kesempatan penyerahan gudang tersebut, Kepala Bappebti menekankan agar Pemda penerima bantuan pembangunan gudang SRG, sungguh-sungguh serius mengimplementasikan instrumen pembiayaan pasca panen itu. Sehingga, manfaat dari instrumen tersebut dapat diserap masyarakat, terutamanya petani produsen.

Di bidang perdagangan berjangka komoditi, Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) meminta baik bursa berjangka maupun pemerintah untuk memperdagangkan kontrak berjangka singkong. Tentunya setelah dilakukan kajian ilmiah kelayakan singkong sebagai subjek kontrak berjangka.

Terlepas dari itu, menurut Ketua MSI, setidaknya ada delapan varian singkong yang layak diperdagangkan bursa berjangka. Karena, delapan varian itu merupakan konsumsi dunia dan produsennya sangat terbatas. Yakni, Negeria, Thailand, Indonesia dan Vietnam.

Jadi, boleh dicoba! Salam! ▲



Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggung Jawab: Syahrul R. Sempurnajaya

Pemimpin Redaksi: Nizarli Wakil **Pemimpin Redaksi:** Natalius Nainggolan

Dewan Redaksi: Harry Prihatmoko, Diah Sandita Arisanti, Poppy Juliyanti, Subagyo, Dharmayugo Hermansyah, Sri Haryati, Rizali Wahyuni **Sirkulasi:** Sapin Siswantoro, Katimin.

Alamat Redaksi: Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat. www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: buletin@bappebti.go.id

DAFTAR ISI

8-9

Resi Gudang

-11 Gudang SRG Diserahkan
Bappebti

20-21

Komoditi

- Warisan James Cook
- Ampuh Untuk Perawatan Kulit



28

Kiprah

Ido Handika
Melesat Bak Pelor



Laporan Utama.....	4-7
- Peluang Selenggarakan PLKA	
- PEMDA Harus Alokasikan APBD untuk PLKA	
Berjangka.....	10-11
- BKDI 'Jemput Bola' Ke Dewan Komoditi	
- Bursa Harus Pikirkan Kontrak Singkong	
Interview.....	12-13
- Lewat Bursa Dapat Lakukan Perencanaan Bisnis	
- SRG Terobosan Memberdayakan Petani	
Agenda Foto.....	14-15
Aktualita	16-17
- Izin BAF & DF Dibekukan	
- Satgas Layani Klaim Nasabah Discovery	
- Nasib LDP-SRG tunggu Sikap Kemenkeu	
- Izin PT Danareksa Futures Dicabut	
Analisa.....	18
- Permintaan Emas Batangan Naik 50%	
- Pasokan Beras Global Naik	
Info Harga.....	19
Breaknews.....	22-23
- FIRST QUARTER OF NON-OIL EXPORT IS EXCEEDING THE TARGET	
- Mari Elka Pangestu : Be Cautious Of Rice Price Increase	
- WEFP CONCRETE OF 20:20:20	
- NATIONAL COCOA & CHOCOLATE INDUSTRY RESSURECTION	
Wawasan.....	24-25
- Beberapa Pengertian Kontrak Derivatif Lainnya (Bagian II)	
Kolom.....	26-27
- Memilih Kontrak Berjangka Murabahah (Bagian II)	



Peluang Selenggarakan PLKA

Pasar lelang merupakan salah satu sarana efektif dan efisien untuk menghasilkan dan memasarkan komoditi pertanian yang memiliki daya saing. Untuk itu pemerintah melalui Bappebti, mendorong kalangan swasta dan koperasi selenggarakan pasar lelang. Sedangkan pasar lelang yang sudah ada akan direvitalisasi.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di tahun 2011 mencanangkan revitalisasi pasar lelang komoditi agro (PLKA) yang diselenggarakan dinas perdagangan di lima wilayah. Masing-masing PLKA Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Bali. Disperindag Provinsi Jawa Timur, menjadi pioner dalam program revitalisasi pasar lelang yang dibina dan dikembangkan Bappebti.

Program revitalisasi PLKA itu telah dibuktikan Disperindag Jatim saat penyelenggaraan pasar lelang yang ke 78 di Pusat Perdagangan Agrobis (Puspa Agro) Jemundo, Sidoarjo, pada 22 Februari 2011, lalu. Salah satu langkah revitalisasi pasar lelang yang ditempuh Disperindag Jatim, yakni menunjuk dan bekerjasama dengan PT Jatim Grha Utama (JGU)- perusahaan BUMD Jatim. Dengan revitalisasi pasar lelang itu, JGU telah menyelenggarakan PLKA Jatim ke 78 pada 22 Februari 2011, lalu. Dan hingga saat ini JGU telah menyelenggarakan PLKA ke 82.

Menurut Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Sutriyono Edi, masih ada empat daerah lagi yang belum merevitalisasi pasar lelang. Hal itu dikarenakan masing-masing daerah memiliki kendala, baik dari sisi pemilihan pihak penyelenggara, lokasi pasar lelang, pengalokasian anggaran, maupun persiapan SDM- sumber daya manusia.

"Masing-masing daerah itu sudah menyampaikan laporannya kepada Bappebti, saat dilakukan evaluasi sebanyak 19 pasar lelang pada 15 Juli 2011, lalu, di Bandung," jelas Sutriyono, kepada **Buletin Kontrak Berjangka**, diruang kerjanya.

Namun demikian, tambah Sutriyono, ditargetkan dalam tiga tahun ke depan masing-masing daerah tersebut sudah melaksanakan revitalisasi. "Harapan kami tidak sampai tiga tahun sudah direvitalisasi. Sehingga masing-masing daerah itu bisa dikoneksikan dengan teknologi informasi. Dengan demikian para pelaku bisa saling bertransaksi melalui sistem yang ada di mana pun lokasi mereka."

Di samping revitalisasi pasar lelang yang diselenggarakan dinas perdagangan daerah, Bappebti juga mendorong penyelenggaraan pasar lelang untuk dilakukan baik dari pihak swasta maupun koperasi. Perangkat Bappebti membuka pasar lelang diselenggarakan pihak swasta dan koperasi yakni dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 01/Bappebti/Per-PL/08/2010, tentang, persetujuan penyelenggaraan pasar lelang dengan penyerahan kemudian.

"Sejak Agustus 2010, lalu, Bappebti sudah membuka peluang bagi swasta dan koperasi untuk selenggarakan pasar lelang. Hasilnya saat ini sudah ada dari pihak swasta yang menyelenggara-

rakan pasar lelang, yakni PT. e-Pasar. Tapi dari kelompok koperasi belum ada yang mengajukan," jelas Sutriyono

Lebih jauh diungkapkan Sutriyono Edi, saat ini pun sudah ada satu kelompok swasta berbasis properti yang ingin mengembangkan pasar lelang. "Kayaknya belum saatnya disebut nama perusahaan itu. Tetapi yang jelas mereka sudah mengajukan proposal dan tata tertib penyelenggaraan pasar lelang, dan sudah pula kami pelajari. Tetapi masih ada beberapa hal yang harus mereka sempurnakan. Jadi, nantinya, kalau sudah dikembalikan lagi dan diperiksa maka mereka akan mengajukan izin penyelenggaraan pasar lelang. Kita harapkan dalam waktu dekat ini 'lah," papar Sutriyono.

"Harapan kami ada juga kalangan koperasi yang menjadi penyelenggara pasar lelang dari daerah. Cuma memang sulit untuk didorong, karena belum ada kita temukan bentuk baku penyelenggara pasar lelang yang mandiri," kata Sutriyono.

Sejatinnya, untuk menyelenggarakan pasar lelang sesuai SK Kepala Bappebti No. 01/Bappebti/Per-PL/08/2010, tidak terlalu berat untuk dilakukan baik kelompok swasta maupun koperasi. Pada pasal 3, ayat 2, persyaratan yang ditetapkan memiliki modal disetor sebesar Rp 1 miliar, memiliki fasilitas sistem perdagangan, memiliki peraturan tata tertib dan kerjasama dengan lembaga

kliring penjaminan pasar lelang.

Bedanya persyaratan yang diberikan kepada dinas perdagangan di daerah hanya dari sisi permodalan. Karena pasar lelang tersebut merupakan milik pemerintah daerah bersangkutan. Sedangkan untuk persyaratan lain berlaku sama.

Penjaminan

Sementara itu, menurut Kepala Bagian Pengawasan Pasar Lelang, Bappebti, Dharmayugo Hermansyah, mengatakan, saat ini sudah siap diajukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 650/MPP/Kep/10/2004, tentang ketentuan penyelenggaraan pasar lelang dengan penyerahan kemudian. "Pada dasarnya revisi Permendag itu untuk menyempurnakan peraturan yang ada, dan memperkuat kelembagaan pasar lelang."

"Berhubung Bappebti saat ini masih disibukan dengan amandemen dua undang-undang, kemungkinan revisi itu akan diajukan bulan Agustus nanti," kata Dharmayugo.

Lebih jauh dijelaskan Dharmayugo, setidaknya hal penting yang akan direvisi dari Permendag itu adalah menyangkut lembaga penjaminan dan penyelesaian transaksi pasar lelang.

"Dalam usulan kami, lembaga ini bisa dibentuk di masing-masing daerah dengan kerjasama lembaga sejenis yang ada di daerah tersebut. Atau, penyelenggara pasar lelang yang diselenggarakan dinas perdagangan membentuk unit penjaminan dan penyelesaian transaksi pasar lelang."

Selain itu, adanya aturan yang mengatur pihak perantara perdagangan untuk bertransaksi di pasar lelang. Peran-

tara Perdagangan ini nantinya harus memperoleh izin, baik yang diperoleh dari Bappebti, maupun dari dinas perdagangan daerah penyelenggara pasar lelang.

"Peran Perantara Perdagangan di pasar lelang ini sama halnya dengan perusahaan pialang berjangka di bursa berjangka. Jadi, dari lembaga ini lah nantinya pembeli untuk bisa melakukan transaksi di pasar lelang," kata Dharmayugo.

Bakti

Satu lagi kelembagaan pasar lelang yang akan diperkuat dalam pengembangan pasar lelang adalah berdirinya badan arbitrase. Badan arbitrase ini nantinya sebagai badan yang menyelesaikan persengketaan dari pihak-pihak bertransaksi di pasar lelang.

"Banyak hal yang bisa diselesaikan di badan arbitrase, misalnya, faktor gagal serah atau gagal bayar. Gagal bayar itu bisa terjadi karena tidak sesuai dengan jumlah yang di bayar, atau tidak sesuai dengan mutu dan waktu. Jadi, untuk mengurangi tingkat kerugian akibat perselisihan itu maka perlu peran badan arbitrase," jelas Dharmayugo.

Mendorong berdirinya badan arbitrase pasar lelang, Bappebti sudah melakukan pendekatan dengan badan arbitrase yang ada. "Bappebti sudah melakukan pendekatan dengan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). Kami pikir lebih baik memaksimalkan lembaga yang ada, dari pada membentuk lembaga baru."

"Pihak BAKTI pun menyambut baik saran Bappebti, sehingga mereka sudah melakukan perubahan anggaran dasar. Kalau tidak salah dalam bulan Juni 2011, ini, BAKTI sudah melaku-

kan perubahan anggaran dasar yang memasukan pasar lelang ke anggaran dasar BAKTI," kata Dharmayugo.

Untuk efisiensi dan kemudahan bagi pihak-pihak yang bersengketa, arbiter akan ditetapkan di masing-masing daerah penyelenggara pasar lelang. Atau, bisa juga menggunakan jasa arbiter yang ada di pusat. Jadi kita harapkan masing-masing daerah penyelenggara menempatkan orangnya sebagai arbiter, tambah Dharmayugo.

"Untuk itu BAKTI nantinya akan melakukan pendidikan dan memberi sertifikasi bagi arbiter yang ada di daerah," jelasnya.

Berdasarkan Permendag No.650/2004, setiap penyelenggara pasar lelang harus memiliki komite arbitrase. Hal ini diatur pada Pasal 10, sedangkan pada Pasal 13, tugas Komite arbitrase bertugas membantu penyelenggara pasar lelang untuk memfasilitasi menyelesaikan perselisihan yang timbul antara anggota pasar lelang yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.

"Pasar lelang Jawa Timur yang sudah direvitalisasi seharusnya memiliki arbiter. Tetapi sampai saat ini belum ada. Makanya kita harapkan BAKTI bisa segera melakukan pendidikan bagi calon arbiter, sehingga jika ada perselisihan di sana sudah bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat," kata Dharmayugo.

Evaluasi pasar lelang yang diselenggarakan Bappebti beberapa waktu lalu, di Bandung, agaknya menyimpan sejumlah amunisi dalam pengembangan pasar lelang di masa mendatang. Sehingga pasar lelang menjadi salah satu instrumen yang dapat dijadikan daerah sebagai lokomotif pengerak ekonomi. Di sisi lain, mendorong petani produsen menghasilkan komoditi unggulan yang memiliki daya saing. ▲

Arah Dan Strategi Pasar Lelang

1.	Penyelenggaraan pasar lelang secara bertahap diarahkan ke swastanisasi dengan harapan dapat memberikan nilai tambah kepada penyelenggara dan stakeholder.
2.	Membangun interkoneksi antara penyelenggara pasar lelang guna mengakselerasikan perdagangan komoditi unggulan antar daerah.
3.	Realisasi nilai transaksi akan dijadikan salah satu indikator evaluasi keberhasilan pasar lelang.
4.	Daerah harus menganggarkan dana pendampingan pasar lelang melalui APBD minimal 35 % dari Dana Dekonsentrasi pasar lelang yang diterima daerah.
5.	Perlu tahapan jelas mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan revitalisasi pasar lelang.
6.	Daerah yang belum memenuhi kriteria revitalisasi pasar lelang, bisa bertransformasi dengan daerah yang sudah memenuhi persyaratan revitalisasi sepanjang memenuhi persyaratan.

Pemda Harus Alokasikan APBD Untuk PLKA



perdagangan ini, maka diminta untuk melebur dengan daerah terdekat dalam penyelenggaraan pasar lelang.

Demikian antara lain diungkapkan Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Sutriono Edi, kepada Buletin Kontrak Berjangka, baru-baru ini. Dikatakan Sutriono Edi, pemerintah daerah harus serius dalam pengembangan pasar lelang. Oleh karena itu, Bappebti meminta daerah untuk mengalokasikan anggaran dari APBD, minimal 35 %

dari dana Dekon. Ini salah satu strategi Bappebti untuk mengukur keseriusan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pasar lelang.

“Hal itu sudah disampaikan kepada penyelenggara pasar lelang saat dilakukan evaluasi sebanyak 19 pasar lelang, pada 15 Juli 2011, lalu, di Bandung,” jelas Sutriono.

Makanya, tambah Sutriono, kami meminta pemerintah daerah untuk melobi pimpinannya dan disampaikan kepada legislatif untuk mengalokasikan anggaran tersebut.

“Pengalokasian anggaran itu agar pasar

lelang dapat terselenggara secara berkualitas dan berkesinambungan. Selama ini, dalam penyelenggaraan pasar lelang daerah memperoleh dukungan pendanaan dari dana dekonentrasi Bappebti yang dialokasikan dari APBN,” jelas Sutriono.

Yang kita harapkan dari pengalokasian anggaran APBD itu, misalnya, selama ini satu daerah bisa selenggarakan pasar lelang sebanyak 6 kali dalam satu tahun, sehingga dengan adanya tambahan dana tersebut bisa diselenggarakan pasar lelang sebanyak 10 kali. Jadi ada penambahan sebagai 4 kali penyelenggaraan pasar lelang, tambahnya.

“Dengan demikian Bappebti sebagai lembaga pembina pasar lelang, bisa mengukur tingkat keberhasilan daerah dalam menyelenggarakan pasar lelang. Lalu, jangka menengah bisa diselaraskan dengan instrumen SRG-sistem resi gudang,” papar Sutriono.

“Jika penyelenggaraan pasar lelang berkualitas, pasar ini pun berpotensi memperdagangkan resi gudang yang komoditinya tersimpan di gudang,” katanya.

Di sisi lain diutarakan Sutriono Edi, bentuk dukungan lain yang diberikan Bappebti sebagai lembaga pembina pasar lelang adalah melakukan edukasi dan sosialisasi, pelatihan SDM pengelola pasar lelang dan program-program lainnya. “Inilah bentuk insentif yang diberikan kepada penyelenggara pasar lelang.”

Menggenjot terselenggaranya Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA) yang berkualitas dan berkesinambungan diberbagai daerah, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku lembaga pembina PLKA, meminta pemerintah daerah penyelenggara mengalokasikan anggaran yang berasal dari APBD minimal 35 % dari nilai Dana Dekonsentrasi yang diterima. Di sisi lain, enam daerah yang masuk ‘zona merah’, karena kurang mampu mengembangkan instrumen

Profil Komoditi Pasar Lelang 2003-2011

TAHUN								
2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Jan-Mei 2011
Beras : 48,4 M	Beras : 176,6 M	Beras : 334,2 M	Beras : 429,8 M	Beras : 341,5 M	Sapi : 557,9 M	Sapi : 426,9 M	Beras : 394,7 M	Beras : 112,1 M
Lada : 2,2 M	Jagung : 155,2 M	Mangga : 65,4 M	Gula : 361,1 M	Sapi : 215,1 M	Beras : 237,5 M	Beras : 313,5 M	Sapi : 246,8 M	Sapi : 44,0 M
Melon : 1,9 M	Ikan : 37,1 M	Kol : 56,6 M	Vanili : 153,8 M	Buah : 182,0 M	Rumput Laut : 196,4 M	M Goreng : 93,1	Gula pasir : 144,7 M	Kentang : 39,0 M
B Merah : 1,3 M	Buah : 29,2 M	Jeruk : 56,5 M	Sapi : 103,8 M	Kopra : 137,9 M	Buah : 81,1 M	Kentang : 73,4 M	Cabe : 100,1 M	Kemiri : 37,1 M
Bijian : 1,3 M	Kentang : 9,3 M	Gaplek : 54,1 M	Jeruk : 71,9 M	Jagung : 81,2 M	Kopra : 63,0 M	Teh : 64,5 M	Kentang : 69,9 M	Pinang : 34,0 M
Jagung : 1,2 M	Gula : 8,1 M	Melon : 34,5 M	Ikan : 50,7 M	Kopi : 80,0 M	Kopi : 62,9 M	Ckg Sawit : 59,2 M	Jagung : 59,9 M	Jagung : 28,4 M
Jahe : 210,0 Jt	Coklat : 6,8 M	Jagung : 28,8 M	Kentang : 38,3 M	Cabe : 69,5 M	Coklat : 57,9 M	Cabe : 50,3 M	Buah-buahan : 42,3 M	Pala : 27,5 M
Cabe : 135,0 Jt	Kopra : 6,4 M	Bandeng : 28,3 M	Cengkeh : 35,2 M	Coklat : 63,3 M	Kentang : 56,8 M	Jagung : 48,3 M	Kemiri : 36,8 M	Cabe : 20,2 M
Pala : 280,0 Jt	Bawang : 5,3 M	K Hijau : 26,2 M	Kopra : 32,9 M	Ikan : 58,0 M	Jagung : 56,8 M	Kopra : 46,9 M	M nilam : 36,6 M	M Goreng : 10,8 M
Kentang : 50,0 Jt	Karet : 4,8 M	Jahe : 26,1 M	Jahe : 32,1 M	Lada : 48,3 M	Gula : 43,0 M	Kopi : 43,0 M	Coklat : 36,4 M	Cacao : 6,0 M

Zona Merah

Dari kegiatan evaluasi pasar lelang yang dilakukan di Bandung itu, juga disoroti penyelenggara yang masuk dalam kategori zona merah. Penyelenggara yang masuk dalam kategori ini dianggap kurang mampu untuk mengembangkan pasar lelang. Untuk itu, tindakan yang diambil adalah melikuidasi pasar lelang tersebut atau meleburkan diri dengan pasar lelang yang wilayahnya berdekatan.

“Tahun 2009 saat dilakukan evaluasi pasar lelang di Manado, sudah diketahui ada sebanyak enam daerah yang masuk zona merah. Ketika di Bandung, pun, posisinya relatif masih sama. Oleh karena itu, tahun 2012 Bappebti mungkin sudah tidak mengalokasikan lagi program pada daerah bersangkutan,” jelas Sutriyono Edi.

Pada dasarnya daerah yang ma-

suk zona merah itu cukup memiliki potensi pengembangan pasar lelang dari sisi komoditinya yang berlimpah, tambahnya. Tetapi karena kurangnya kemampuan SDM- sumber daya manusia, di daerah tersebut, sehingga pasar lelang kurang berkembang.

Aspek yang menonjol kelemahan daerah dalam menyelenggarakan pasar lelang adalah rotasi SDM yang sering berganti-ganti. Sehingga program tersebut tidak berkesinambungan dengan pejabat pengganti. Di sisi lain, minimnya pengetahuan terhadap instrumen ini.

“Dari evaluasi yang dilakukan, kelemahan pasar lelang yang berada di zona merah, misalnya, saat ini sudah ada operator yang dilatih dan memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pasar lelang. Tetapi, oleh pejabat yang lebih tinggi meminta operator

tersebut untuk menangani unit lain. Sedangkan penggantinya belum menguasai pelaksanaan pasar lelang, sehingga program ini terbengkalai,” tandas Sutriyono.

Oleh karena itu, Bappebti mendorong dilakukannya revitalisasi pasar lelang. Yakni dengan cara pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak swasta atau BUMD dalam menyelenggarakan pasar lelang. Dalam program revitalisasi pasar lelang tersebut, Bappebti telah menetapkan lima daerah masing-masing PLKA Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Bali.

Disperindag Jatim, pada 22 Februari 2011, lalu, sudah berhasil melakukan revitalisasi PLKA, yakni bekerjasama dengan PT Jatim Grha Utama (JGU)-perusahaan BUMD Jatim. ▲

PROFIL DAN PERKEMBANGAN PASAR LELANG 2003 - 2011

PROFIL	TAHUN									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Jan-Mei 2011	
PENYELENGGARA	3	9	14	19	19	19	21	21	19	
FREKUENSI LELANG	5	22	44	126	142	142	97	97	29	
PENJUAL	1.199	116	480	829	932	624	2.047	2.122	803	
PEMBELI	301	75	256	369	276	184	509	681	237	
NILAI TRANSAKSI	57,331,750,000	463,363,559,500	1,110,494,230,750	1,798,442,257,075	1,723,348,860,671	1,726,440,462,731	1,705,616,818,973	1,568,954,219,382	443,598,050,968	
1. Sumatera Utara		4.991.054.500		10.275.428.855	4.045.092.650	8.559.157.731	2.812.426.473	-		
2. Sumatera Barat			43.000.000	4.384.990.000	2.402.768.000	3.410.208.500	4.584.482.500	4.161.512.500	8.692.376.500	
3. Kab. Agam			1.142.415.000	5.748.097.500	7.449.625.250	6.200.252.500	4.576.215.000	7.732.230.000		
4. Riau		8.184.280.000	9.418.702.000	28.807.300.000	14.871.790.000	10.305.400.000	7.746.560.000	7.525.750.000		
5. Jambi			299.750.000	4.131.561.000	9.595.989.000	6.531.050.000	7.951.726.000	4.306.035.750	7.000.044.468	
6. Bengkulu				6.424.720.000	1.641.500.000	589.000.000	2.192.300.000	3.045.750.000	972.000.000	
7. Lampung				6.857.625.000	6.164.780.000	75.617.679.000	39.654.525.000	44.354.000.000		
8. DKI Jakarta		12.490.000.000	227.354.523.750	238.474.775.000	181.327.900.000	43.817.500.000	8.100.150.000	13.870.300.000		
9. Jawa Barat	49.689.250.000	177.487.450.000	147.199.650.000	122.707.595.000	107.157.225.000	102.709.095.000	185.807.475.000	201.496.075.000	44.879.800.000	
10. Jawa Tengah	6.338.250.000	58.080.500.000	253.612.215.000	745.713.922.710	429.206.238.271	447.792.750.000	304.547.715.000	238.692.189.132	47.581.100.000	
11. Barlingmascakeb		18.176.025.000		56.026.350.000	65.599.500.000	115.421.290.000	31.453.900.000	36.156.300.000		
12. Yogyakarta							142.017.300.000	145.235.912.500	18.965.000.000	
13. Jawa Timur	1.304.250.000	45.159.750.000	307.798.500.000	248.209.895.000	269.054.125.000	436.224.275.000	502.297.100.000	549.549.440.000	228.674.800.000	
14. Bali			8.317.100.000	63.380.330.000	291.723.682.500	258.770.250.000	285.915.300.000	112.313.450.000	98.000.000	
15. NTB			12.985.000.000	15.685.775.000	75.278.225.000	57.462.490.000	50.379.150.000	52.190.175.000	9.694.400.000	
16. Kalimantan Barat				34.942.200.000	3.228.900.000	5.368.500.000	974.600.000	4.470.400.000	4.964.980.000	
17. Kalimantan Timur				23.594.000.000	433.840.000	5.513.040.000	980.174.000	3.092.452.000		
18. Sulawesi Utara		16.230.000.000		54.255.717.000	142.329.365.000	59.381.125.000	59.037.650.000	91.468.637.500	65.925.100.000	
19. Sulawesi Selatan		122.564.500.000	142.323.375.000	119.395.400.000	102.837.560.000	78.960.900.000	71.493.000.000	12.392.250.000	3.410.100.000	
20. Sulawesi Tenggara				9.646.575.000	9.200.755.000	3.806.500.000	10.032.070.000	24.688.860.000		
21. Gorontalo							3.063.000.000	12.212.500.000	2.740.350.000	



11 Gudang SRG Diserahkan Bappebti

Untuk memacu dan mendorong implementasi sistem resi gudang (SRG), pemerintah melalui APBN telah membangun gudang komoditi primer yang nantinya di jadikan gudang SRG. Pada tahun 2009, melalui Dana Stimulus Fiskal Tahun 2009, di bangun sebanyak 41 unit gudang SRG yang terdiri dari 35 gudang flat dan 6 silo. Dan seluruhnya gudang SRG tersebut telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Untuk tahun 2010, melalui APBN-P Tahun 2010, juga dibangun sebanyak 15 gudang SRG di 11 kabupaten-kota.

Di samping itu, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah merencanakan melakukan survei gudang milik swasta atau koperasi yang ada di seluruh Indonesia, untuk dapat digunakan dalam skema SRG. Survei gudang yang memenuhi Standar Nasional Indonesia- SNI, itu, akan dilakukan kerjasama dengan PT Surveyor Indonesia (Persero).

Demikian antara lain diutarakan Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, dalam Pembukaan Pelatihan Teknis Penyuluh Lapangan Sistem Resi Gudang dan penyerahan gudang kepada pejabat dari 11 pemerintah kabupaten dan kota, di Bali, 12 Juni 2011. Hadir dalam acara itu antara lain Kepala Disperindag Bali, Gede Darmaja, Bupati Musi Banyuasin, Pahari Azhari, Bupati Grobogan, Bambang Pudjono, serta Kepala Disperindag dari berbagai kabupaten-kota penerima bantuan pembangunan gudang SRG. Selain itu, acara ini juga dihadiri Sekretaris Bappebti, Nizarli, Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bappebti, Sutriyono Edi, dan

peserta penyuluh lapangan yang menerima bantuan pembangunan gudang SRG.

Masing-masing daerah yang menerima bantuan pembangunan gudang SRG dari APBN-P 2010 adalah, Kabupaten Pidie, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Lebak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sumbawa, Kota Palopo, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Maluku Tengah.

Jargon

Di hadapan para pejabat pemerintah daerah itu, dikatakan Syahrul R. Sempurnajaya, "kami mohon pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan SRG dengan mempercepat berfungsinya gudang-gudang tersebut. Serta, menyusun program-program terobosan untuk pemanfaatan gudang SRG sehingga dapat berjalan dengan optimal.

"Sesuai dengan UU No.9/2006, tentang Sistem Resi Gudang, kami harapkan pemerintah daerah juga dapat memberikan kemudahan bagi sektor usaha kecil dan menengah serta kelompok tani dalam pemanfaatan SRG," katanya.

"Pada kesempatan ini pun, kami sampaikan pula harapan agar Pemda dapat menyediakan anggaran daerah dalam rangka implementasi dan pengembangan SRG. Di mana anggaran tersebut nantinya dapat di alokasikan untuk kegiatan operasional gudang SRG serta penyiapan SDM- sumber daya manusia dan peralatan atau perlengkapan pen-

dukung operasional gudang."

"Jadi Pemda juga harus kerja, jangan asal terima bantuan dari pusat. Pada dasarnya, jika pejabat daerah peduli dan mau mengambil simpati dari rakyat, program SRG ini sangat tepat dijadikan jargon para elit politik daerah seperti bupati, walikota dan legislatif. Kalau itu bisa dilakukan, ini hal yang positif. Karena pada akhirnya masyarakat yang akan diuntungkan," jelas Syahrul.

Karena apa, tambahnya, implementasi SRG ini bisa memberi manfaat baik bagi perekonomian nasional maupun daerah. Manfaat lain SRG adalah dapat meningkatkan produktivitas pertanian serta dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional, melalui pengendalian stok pangan yang efisien dan meningkatkan ekspor. Bagi perekonomian daerah, SRG dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong tumbuhnya investasi daerah dengan tumbuhnya pelaku usaha, industri perdagangan, jasa perbankan, jasa asuransi, dan jasa pengujian mutu.

"Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi kebijakan SRG baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para stakeholder SRG untuk dapat mewujudkan SRG sebagai instrumen pembiayaan perdagangan yang efektif. Serta, membangun SRG sebagai kekuatan ekonomi para petani dan UKM," ujar Syahrul.

Selain itu, tambahnya, perlu dipersiapkan sebagai tenaga penyuluh lapangan SRG yang berada pada garda terdepan. Karena mereka inilah yang selalu berhubungan dengan petani dan dapat memberi informasi tentang SRG

melalui penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi maupun edukasi secara berkesinambungan di daerah sentra-sentra produksi.

Survei Gudang

Sejatiannya, instrumen pembiayaan pasca panen ini dilakukan pihak swasta atau pelaku komoditi. Tetapi karena instrumen ini merupakan program baru pemerintah, maka pemerintah melalui Bappebti yang memperkenalkan pada masyarakat. Di beberapa negara maju yang sudah menjalankan SRG, tidak lagi dilakukan secara berkelompok, melainkan sudah dilaksanakan secara perorangan. “Tentunya, untuk menuju ke sana perlu waktu dan pema-

haman yang tinggi masyarakat tentang manfaat SRG,” kata Syahrul.

“Kami sangat meyakini Indonesia bisa melakukan hal itu, tetapi perlu waktu dan kerja keras dari seluruh stakeholder. Jadi, pembangunan gudang yang dilakukan pemerintah ini sifatnya prime mover- perangsang,” tambah Syahrul.

Upaya lain yang dilakukan Bappebti untuk mendorong implementasi SRG yakni memanfaatkan gudang yang dimiliki baik pihak swasta maupun koperasi. Untuk itu, akan dilakukan survei gudang yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia- SNI di seluruh tanah air.

“Kami- Bappebti, akan bekerjasama dengan PT Surveyor, untuk mendata gudang di seluruh Indonesia yang sesuai dengan SNI. Dengan demikian,

nantinya masyarakat didorong untuk dapat memanfaatkan gudang tersebut dalam penyimpanan komoditi,” jelas Syahrul.

“Jika itu bisa dilaksanakan di masa mendatang, maka kita seketika akan dapat mengetahui jumlah stok komoditi yang ada. Dan berdasarkan data itulah kita bisa mengambil kebijakan komoditi pangan nasional, apakah harus di ekspor atau impor,” tegas Syahrul.

“Kalau sekarang misalnya kita impor beras, data yang ada belum akurat, hanya angka perkiraan. Tetapi kalau kita sudah memiliki data dari gudang-gudang itu, kita bisa ketahui jelas berapa kebutuhan dan kekurangan. Maka bisa diputuskan kebijakan impor atau ekspor,” imbuh Syahrul. ▲



Bupati Musi Banyuasin, Pahri/Azhari.

Secara fisik gudang SRG yang ada di Kecamatan Lalan, sudah siap beroperasi. Bantuan pembangunan gudang ini kami terima dari dana APBN-P tahun 2010, lalu.

Untuk meningkatkan kualitas gabah yang dihasilkan petani, tahun 2011 ini, pun, kami mengajukan kepada pemerintah pusat bantuan pengadaan satu unit mesin pengering. Karena gabah yang berkualitas baik akan lebih lama masa penyimpanannya.

Sedangkan yang kami upayakan dari daerah dalam pembangunan gudang SRG tersebut adalah dana pembangunan pagar. Karena, lokasi keberadaan gudang SRG ini cukup luas, mencapai 3 hektar.

Pembangunan pagar tersebut akan dilakukan tahun ini. Pembiayaannya berasal dari APBD-P 2011. Dana yang dialokasikan dari APBD-P, itu, sebesar Rp 1,5 miliar.

Selain itu, untuk meringankan petani dalam pengiriman gabah dari sawah ke gudang, kami sudah sediakan satu unit becak motor. Dengan alat transportasi ini, akan meringankan petani karena bisa menjangkau medan yang berat. ▲



Kepala Disperindag Bali, Gede Darmaja

Provinsi Bali sesungguhnya memiliki potensi dalam pengembangan SRG. Karena dari beberapa daerah kami, setiap tahun surplus komoditi pangan. Tetapi sampai saat ini belum ada gudang SRG di Bali.

“Pernah ada wacana untuk pembangunan gudang SRG. Tetapi entah bagaimana wacana itu tidak bisa direalisasikan.”

Daerah yang potensial dibangun gudang SRG di Kabupaten Tabanan. Untuk tahun mendatang kami upayakan bisa mendapat bantuan dari pemerintah pusat, membangun gudang SRG.

Tetapi, kalau pun tidak ada lagi bantuan pembangunan gudang SRG dari pemerintah pusat tahun mendatang, kami akan menggunakan gudang swasta atau gudang lainnya yang memenuhi persyaratan SNI. “Sehingga Provinsi Bali bisa mengimplementasikan pembiayaan pasca panen SRG.”

Seperti dijelaskan Kepala Bappebti, pak Syahrul R. Sempurnajaya, gudang swasta atau BUMN, pun, bisa digunakan untuk penyimpanan komoditi dalam skema SRG, yang terpenting sesuai SNI. ▲



BKDI 'Jemput Bola' Ke Dewan Komoditi

Sejak UU No.18 tahun 2004, tentang perkebunan, diberlakukan, belum pernah ada koordinasi dengan pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi. Pada hal, komoditi hasil perkebunan merupakan subjek kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan bursa berjangka. Indonesia yang menghasilkan beragam komoditi unggulan, belum bisa menciptakan pasar berjangka komoditi di dalam negeri. Sehingga harga komoditi yang diperdagangkan di dalam negeri mengacu ke bursa berjangka luar negeri.

Demikian antara lain diutarakan Ketua Forum Komunikasi Dewan Komoditi (FKDK), Azis Pane, dalam pembukaan sosialisasi perdagangan berjangka komoditi yang diselenggarakan Bursa komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), bekerjasama dengan Forum Komunikasi Dewan Komoditi, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan, 7 Juni 2011, di Gedung Ditjen Perkebunan, Jakarta.

Hadir dalam sosialisasi tersebut diantaranya, Kepala Biro Analisis pasar, Bappebti, Ismadjaja Toengkagie, Komisaris BKDI, Fenny Widjaja, Dirut BKDI, Megain Widjaja, Direktur PT Identrus Security International, Nursalam, serta sejumlah pengurus Dewan Komoditi dan pejabat Kementerian Pertanian.

"Sebagai negara produsen komoditi, Indonesia semestinya dapat memainkan peran penting dalam menentukan harga komoditi. Tetapi karena tidak adanya pasar komoditi di dalam negeri, membuat harga komoditi mengacu ke bursa luar negeri," jelas Azis Pane.

Dengan kehadiran BKDI, tambah Azis, diharapkan dapat memainkan peran-

nya dalam penentuan harga komoditi. Sehingga komoditi Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

"Ini kali pertama Dewan Komoditi bertatap muka dengan bursa berjangka dan badan pengawas bursa berjangka-Bappebti. Pada hal, UU No. 18, tentang Perkebunan, sudah ada sejak tahun 2004. Jadi kami sangat mengapresiasi inisiatif BKDI untuk melakukan sosialisasi perdagangan berjangka komoditi," kata Azis.

Menurut Azis Pane, cukup banyak komoditi Indonesia yang bisa dijadikan subjek kontrak berjangka. "Jadi kami pun sangat mendukung program pengembangan pasar berjangka di dalam negeri. Nantinya, setelah sosialisasi ini masing-masing Dewan Komoditi akan kami minta untuk melanjutkan program yang lebih nyata. Sehingga terbentuk pasar komoditi di dalam negeri."

Pajak Ganda

Di pihak lain, Ismadjaja Toengkagie, mengatakan, sosialisasi dengan berbagai instansi terkait sudah sering diselenggarakan Bappebti bersama bursa. Namun disadari tidak semudah membalikan tangan untuk mengenalkan instrumen perdagangan berjangka bagi masyarakat Indonesia.

"Bappebti senantiasa melakukan sosialisasi dengan berbagai pelaku komoditi, baik dalam hal pengembangan perdagangan berjangka maupun instrumen pasca panen sistem resi gudang. Dua instrumen tersebut saling berkaitan dalam menciptakan pasar di dalam negeri, dan mendorong petani menghasilkan komoditi yang memiliki daya saing," papar Ismadjaja.

Lebih jauh dikatakan, Bappebti telah melakukan kajian komoditi yang layak diperdagangkan bursa berjangka. Diantaranya, kajian komoditi kopi, kakao dan batubara.

Di samping itu, bursa berjangka pun wajib melakukan kajian sebelum komoditi tersebut dijadikan subjek kontrak berjangka. Diantaranya komoditi yang sudah diperdagangkan bursa berjangka yakni crude palm oil- CPO, minyak goreng dan emas.

Namun diakui Ismadjaja, kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan bursa belum likuid. Karena belum sepenuhnya mendapat dukungan dari pelaku komoditi. Hal ini pun disebabkan masih adanya berbagai kendala, seperti aspek perpajakan yang dapat membebankan pelaku komoditi.

"Oleh karena itu, Bappebti senantiasa menyarankan agar pelaku komoditi bisa bertransaksi melalui bursa berjangka. Jika nanti ada hambatan yang membebankan seperti pajak ganda, Bappebti akan siap melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan untuk keringanan pajak. Tetapi bila tidak ada usulan dari pelaku pasar, maka hal itu akan sulit dilakukan," tandas Ismadjaja.

Sementara itu, Megain Widjaja, mengatakan, kami sangat bangga bisa melakukan sosialisasi perdagangan berjangka dengan Forum Komunikasi Dewan Komoditi.

"Karena inilah salah satu pintu masuk kepada pelaku komoditi untuk memperkenalkan perdagangan berjangka. Nantinya pun kami akan melanjutkan program sosialisasi ini dengan masing-masing Dewan Komoditi," imbuh Megain Widjaja. ▲

Bursa Harus Pikirkan Kontrak Singkong

Boleh jadi Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang memperdagangkan kontrak berjangka komoditi singkong, jika bursa berjangka berniat mengkaji komoditi singkong sebagai subjek kontrak berjangka. Setidaknya ada delapan varian dari komoditi singkong yang saat ini diperdagangkan di pasar internasional. Dan ceruk pasarnya pun cukup besar, sedangkan negara produsen pesaing hanya ada Nigeria, Thailand dan Brasil. Indonesia saat ini menempati urutan ketiga sebagai negara produsen komoditi singkong di bawah Nigeria dan Thailand.

Demikian antara lain diutarakan Ketua Masyarakat Singkong Indonesia (MSI), Suharyo Husen, disela-sela sosialisasi perdagangan berjangka komoditi yang diselenggarakan Bursa komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), bekerjasama dengan Forum Komunikasi Dewan Komoditi, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan, 7 Juni 2011, di Gedung Ditjen Perkebunan, Jakarta.

"Sangat memungkinkan Indonesia memperdagangkan kontrak berjangka singkong. Karena itu kita minta bursa berjangka untuk lakukan studi. Kalau itu bisa dilakukan, Indonesia sebagai negara pertama yang memperdagangkan kontrak berjangka singkong," jelas Suharyo Husen.

Menurut Suharyo, jika bursa memperdagangkan kontrak berjangka singkong, petani akan terpacu memproduksi produk-produk berbasis singkong yang sesuai standar internasional. Dengan demikian petani pun bisa meningkatkan kesejahteraannya.

"Saya cukup optimis jika bursa memperdagangkan kontrak singkong. Setidaknya ada delapan produk singkong yang laku dipasaran, diantaranya tapioka, chips, gapek, mokaf, tepung singkong yang disebut dengan casava powder dan

ada juga tepung gapek. Dan produk masa depan yang paling ramah lingkungan, bahan bakar bio-etanol. Jadi semua itu layak diperdagangkan bursa berjangka," ungkap Suharyo.

SRG

Lebih jauh dikatakan Suharyo Husen, MSI menargetkan tahun 2015 nanti Indonesia tidak lagi memperdagangkan singkong dalam bentuk segar. Tetapi sudah dalam bentuk olahan, sehingga petani bisa menikmati nilai tambahnya yang jauh lebih tinggi. "Oleh karena itu informasi harga dari bursa berjangka sangat perlu. Kalau menjual dalam bentuk mentah, tempo tiga hari saja sudah membusuk."

"Kami juga nantinya mengarahkan chips, tapioka, dan lain-lainnya itu bisa dimasukkan dalam skema SRG-sistem resi gudang. Sehingga petani bisa memperoleh pembiayaan pasca panen dari bank," tandas Suharyo.

Untuk mencapai target MSI di tahun 2015 itu, menurut Suharyo Husen, MSI sudah melakukan berbagai strategi, diantaranya MoU dengan berbagai lembaga dan

memperkuat hubungan antara produsen. Di sisi lain, MSI mendorong petani membudidayakan varietas singkong unggulan yakni varietas Darul Hidayah dan Manggu. Produktivitas kedua varietas itu mencapai 100 ton per hektar. Dan yang tak kalah penting, menggiring petani berkelompok hingga mendirikan koperasi serta memiliki fasilitas pengolahan.

Potensi pasar produk singkong Indonesia ada di tiga negara Asia, yakni Cina, Taiwan, dan Korea Selatan.

"Target kami bisa memenuhi kebutuhan Cina. Sebab, dari satu pabrik saja di sana setiap tahun membutuhkan 4 juta ton chip singkong, dengan tingkat kekeringan 12-13 persen. Atau, sekitar 33 ribu ton perbulan. Begitu juga Korea Selatan dan Taiwan, pertahunnya

membutuhkan sekitar 1 juta ton per-tahun produk singkong," ujar Suharyo Husen.

Sementara itu, Dirut BKDI, Megain Widjaja, menanggapi usulan Suharyo Husen, mengatakan, kami menyambut baik saran tersebut dan akan kami pertimbangkan.

Namun menurut dia, kajian terhadap sebuah komoditi yang dapat dijadikan sebagai subjek kontrak berjangka



tidak 'lah semudah yang dibayangkan. Kajian itu harus terperinci baik dari aspek pasar, produksi maupun dari sisi pelakunya.

"Tapi inilah manfaat kita mendekatkan diri dengan para pelaku komoditi, sehingga bisa diperoleh berbagai masukan dan saran. Dan itulah tujuan kami sejak berdiri, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara produsen dan sekaligus menjadi pasar komoditi dunia," imbuh Megain Widjaja. ▲

Lewat Bursa Bisa Lakukan Perencanaan Bisnis



Jeffrey Mulyono, Presiden Direktur PT Bhakti Energi Persada

Jawab (J). Bisnis batubara ini cukup besar, sehingga dengan adanya bursa berjangka memperdagangkan kontrak berjangka batubara tidak akan mengurangi opportunity dan risk taking para pengusaha. Di samping itu, konsumen batubara seperti PLN (Perusahaan Listrik Negara) dan industri lainnya, dapat menentukan harga dalam jangka dua tahun ke depan. Sehingga, para pelaku bisa menentukan basis kepastian-kepastian harga dan suplai dalam suatu perencanaan bisnis.

(T). Kalau Indonesia selama ini berorientasi ekspor, apakah tidak lebih baik bursa memperdagangkan high rank coal?

(J). Nanti dulu, yang penting sekarang Indonesia punya dulu tools- bursa berjangka yang memperdagangkan kontrak batubara. Bisa saja bursa berempati kepada kebutuhan industri lokal, tetapi jangan dibatasi. Perlu diketahui, saat ini kebutuhan batubara sangat tinggi, tetapi suatu saat akan menemukan titik keseimbangan dan menuju penurunan karena suplai yang cukup dan adanya penemuan tambang baru. Kalau itu terjadi, maka akan over suplai dan harga turun.

Pengantar Redaksi. Di sela-sela presentasi komoditi batubara sebagai subjek kontrak berjangka, yang diselenggarakan Bappebti, 25 Mei 2011, lalu, **Buletin Kontrak Berjangka** berkesempatan mewawancarai salah satu pelaku industri batubara dalam negeri, yakni Presiden Direktur PT Bhakti Energi Persada, **Jeffrey Mulyono**. Menurut Jeffrey, peluang besar bagi Indonesia untuk memperdagangkan kontrak berjangka batubara di bursa berjangka. Di samping kebutuhan industri yang semakin tinggi terhadap konsumsi batubara, melalui bursa berjangka industri bisa melakukan perencanaan bisnis. Berikut ini petikannya.

(T). Jika kelak bursa berjangka Indonesia memperdagangkan kontrak berjangka batubara, apakah spesifikasinya low rank coal atau high rank coal?

(J). Di Indonesia saat ini konsumen batubara terbesar adalah PLN. Beberapa pembangkit listrik PLN ada juga yang menggunakan high rank coal, seperti PLTA Suralaya menggunakan batubara di atas 5.000 kkal, tetapi ada juga yang di bawah 5.000 kkal. Tetapi perlu diperhatikan juga, saat ini ada tren pembangkit listrik di dunia menggunakan low rank coal. Karena untuk menggunakan yang high rank coal supplainya sudah sangat terbatas dipasaran dan jelas harganya sangat mahal. Sehingga saran saya, bursa memperdagangkan batubara yang low rank coal. Tetapi, bursa juga harus memperhatikan kebutuhan pasar yang high rank coal.

(T). Menurut Anda di mana posisi Indonesia dalam kancah pasar batubara dunia?

(J). Sekarang ini negara produsen terbesar batubara adalah Cina, produksinya mencapai 3,5 miliar ton pertahun. Tetapi konsumsi batubara Cina mencapai 3,6 miliar ton pertahun, jadi mereka ada kekurangan dan impor sekitar 100 juta ton. Sedangkan Indonesia, tahun lalu (2010) memproduksi sebesar 330 juta ton, tetapi yang dikonsumsi di dalam negeri hanya sekitar 70 juta ton. Jadi, sisanya sekitar 260 juta ton di ekspor ke luar negeri. Inilah yang disebut beberapa kalangan, Indonesia hanya berorientasi ekspor batubara. Pada hal, para pelaku batubara itu hanya mencari volume operation yang menguntungkan, kalau dengan volume pertambangan yang kecil pasti rugi 'lah mereka. Jadi, kalau demand atau konsumsi lokal sedikit berarti mereka lakukan ekspor. ▲

Tanya (T). *Menurut Anda, sejauh mana potensi bursa berjangka Indonesia dalam memperdagangkan kontrak batubara?*

Yusyus Kuswandana, Anggota Komisi VI DPR RI

SRG Terobosan Memberdayakan Petani



Dalam sebuah kesempatan sosialisasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang diselenggarakan Bappebti bagi kelompok tani di Sumedang, Jabar, 25 Juni 2011, lalu, **Buletin Kontrak Berjangka**, berkesempatan mewawancarai **Yusyus Kuswandana**, yang dalam kesempatan itu menjadi salah satu narasumber. Menurut politikus Partai Demokrat di Komisi VI DPR RI, ini, SRG bisa dijadikan terobosan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Selengkapnya berikut ini petikannya;

Tanya (T). *Bagaimana pandangan Anda setelah Komisi VI DPR RI melakukan kajian SRG di Bulgaria?*

Jawab (J). Sistem Resi Gudang (SRG) sudah diselenggarakan di beberapa negara, instrumen pembiayaan pasca panen ini semakin populer sejak tahun 2000-an. Meski saya tidak ikut dalam kunjungan ke Bulgaria, itu, tetapi kami berkesimpulan kami dengan kawan-kawan di Komisi VI DPR RI, bahwa ada yang baik untuk diimplementasikan di Indonesia, tetapi ada juga yang tidak bisa kita adopsi. Karena, kultur kita juga sangat berbeda dengan mereka. Tetapi hal-hal

yang positif untuk pengembangan SRG harus kita jalankan di Indonesia.

(T). *Misalnya apa yang tidak mungkin bisa di lakukan di Indonesia?*

(J). Setelah kami pelajari SRG ini diberbagai negara luar, pelaku SRG sudah mengarah pada pelaku orang per orang, tetapi untuk di Indonesia hal itu belum memungkinkan. Oleh karena itu, harus diarahkan kepada kelompok tani atau gabungan kelompok tani.

(T). *Apa harapan Anda terhadap instrumen pembiayaan pasca panen ini?*

(J). Di masa mendatang, SRG harus dijadikan sebuah terobosan alternatif di mana negara atau pemerintah memberdayakan adanya fungsi dari para petani. Baik dari perkembangan sektor pertanian maupun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan penghasilan para petani. Karena pada dasarnya esensi dari SRG ini adalah memperpendek mata rantai distribusi perdagangan dari petani hingga ke pasar. Oleh karena itu, harapan saya implementasi SRG ini yang sudah dipayungi undang-undang dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat dimanfaatkan betul oleh para petani.

(T). *Bagaimana pengamatan Anda terhadap program SRG yang sudah dilaksanakan Bappebti?*

(J). Dalam pengamatan saya, Bappebti sudah melakukan tugasnya dalam memasyarakatkan Undang-undang SRG ini. Tetapi memang belum cukup dan tidak mudah untuk dapat mengubah pola pikir para petani. Oleh karena itu program edukasi dan sosialisasi harus terus dilakukan dan berkesinambungan. Kami pun dari legislatif dengan senang hati bisa melakukan sosialisasi Undang-un-

dang SRG, hanya saja waktu yang tidak memungkinkan. Tetapi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kami sebagai legislatif, kami pun akan mengawal berjalannya undang-undang ini sesuai seperti yang diharapkan.

(T). *Pemerintah Pusat tentunya harus mendapat dukungan daerah, apa saran Anda?*

(J). Kami juga menghimbau para pejabat pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk bisa mendukung program SRG ini. Karena itu, berbagai peraturan daerah harus diselaraskan dengan Undang-undang SRG, sehingga tidak saling menghambat. Melainkan mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Demikian pula dari kalangan elite politik lokal, harus bisa memberi dukungan dan menjamin terlaksananya program ini dengan baik.

(T). *Anda salah satu putra daerah, apa pendapat Anda terhadap gudang SRG Sumedang ini?*

(J). Dibangunnya gudang SRG oleh pemerintah dalam hal ini Bappebti, di wilayah Sumedang, memiliki keunikan. Karena di titik dibangunnya gudang SRG ini, bisa menampung hasil produksi petani baik dari wilayah Subang, maupun dari Majalengka. Karena potensi hasil pertanian dari tiga wilayah ini cukup besar. Jadi harapan saya gudang ini bisa meningkatkan sektor pertanian Sumedang, dengan petani yang menghasilkan produk berkualitas. Karena komoditi yang bisa masuk gudang adalah komoditi yang memenuhi standar nasional. ▲

Agenda Foto



Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya dan jajaran Eselon II Bappebti menerima Tim Penilai Wilayah Tertib Administrasi (WTA) yang dipimpin oleh Irjen. Kemendag, Eddy Suseno. Dalam keterangannya, Irjen Eddy Suseno mengatakan bahwa penilaian terhadap WTA ini bermaksud untuk mengetahui sampai sejauh mana pelayanan terhadap publik, yang ditopang SDM berkualitas dan penggunaan teknologi. Jakarta, 27 Juni 2011



Dialog Interaktif di TVRI Pusat, Jakarta dalam acara Suara Parlemen yang disiarkan secara langsung, mengambil tema Perubahan RUU Perdagangan Berjangka Komoditi. Narasumber dialog tersebut Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Tambubolon. Jakarta, 15 Juni 2011.



Bappebti bekerjasama dengan Pemda Kab. Sumedang, Jabar, melaksanakan Sosialisasi Sistem Resi Gudang, di Gudang Sistem Resi Gudang di Dusun Tolengas, Kec. Tomo. Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya, Anggota Komisi VI DPR RI Yusyus Kuswandana, Manager UIMKM Bank Jabar Banten, Eselon II Bappebti, Pejabat Pemda dan Kabupaten di Jawa Barat, Pelaku Usaha, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani. Setelah menyampaikan arahan Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya dan Anggota Komisi VI DPR RI Yusyus Kuswandana, memberi keterangan kepada wartawan. Sumedang, 18 Juni 2011.



Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan Syahrul R. Sempurnajaya didampingi Kepala Disperindag Bali Gde Darmaja dan Sekretaris BAPPEBTI Nizarli serta Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa BAPPEBTI, Sutriyono Edi, menyerahkan 11 Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) kepada 11 Kabupaten/Kota yang merupakan realisasi dari Program APBN-P Kementerian Perdagangan Tahun 2010. Bali, 12 Juni 2011.



Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, Anggota Komisi VI DPR RI Yusus Kuswandana dan Direktur Komersial Bank Jabar Banten, Entis Kushendar, menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif di TVRI Bandung yang disiarkan secara langsung, dengan tema Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai salah satu alternatif pembiayaan. Bandung, 17 Juni 2011.



Kepala BAPPEBTI Syahrul R Sempurnajaya menghadiri sekaligus membuka kegiatan Evaluasi 19 penyelenggara Pasar Lelang. Acara tersebut dihadiri eselon II BAPPEBTI, Kepala Dinas dari 19 daerah penyelenggara Pasar Lelang serta undangan lainnya. Bandung, 15 Juni 2011.



Izin BAF & DF Dibekukan

PT Buana Arta Futures (BAF) dan PT Discovery Futures (DF), perusahaan pialang anggota Jakarta Futures Exchange (JFX) izin usahanya dibekukan Bappebti. Pembekuan izin usaha pialang itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Bappebti. Untuk PT. Buana Arta Futures, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 1328/BAPPEBTI/SA/06/2011, tertanggal 9 Juni 2011.

Sedangkan untuk PT. Discovery Futures, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 1335/BAPPEBTI/SA/06/2011, tertanggal 14 Juni 2011.

Pembekuan izin usaha bagi

BAF dilakukan Bappebti berdasarkan surat Direktur Utama PT. Buana Arta Futures, yang mengajukan permohonan Non-Aktif Operasional untuk sementara. Hal itu dikarenakan BAF mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan permodalan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Sementara itu, pembekuan izin usaha DF dilakukan karena berdasarkan hasil audit Tim Bappebti, terdapat penyalahgunaan dana nasabah pada rekening terpisah. Sehingga menyebabkan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan tidak dapat

dipertahankan. Selain itu, DF tidak memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dengan pembekuan izin usaha tersebut, izin Wakil Pialang Berjangka yang terdapat di masing-masing perusahaan juga ikut dibekukan. Dan, berdasarkan peraturan kedua perusahaan pialang berjangka ini masih memiliki peluang untuk beroperasi kembali. Namun, harus mengajukan kembali pengaktifan izin usaha pialang berjangka dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. ▲

Satgas Layani Klaim Nasabah Discovery

PT. Discovery Futures (DF) sejak dibekukan izin usahanya per tanggal 14 Juni 2011 oleh Bappebti, penyelesaian terhadap nasabah ditangani oleh Satuan Tugas Penanganan Penyelesaian Pengaduan Nasabah (Satgas). Satgas mulai bekerja melayani mantan nasabah sejak Jakarta Futures Exchange (JFX) membekukan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) pialang bersangkutan per tanggal 17 Juni 2011.

Tim Satgas yang dibentuk untuk penyelesaian sengketa an-

tara nasabah dan pialang bermasalah beranggotakan dari masing-masing instansi Jakarta Futures Exchange (JFX), Pt Kliring Berjangka Indonesia (persero), Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI), Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI), dan Bappebti.

Dalam pengumuman Satgas yang dimuat di salah satu koran harian nasional, disebutkan Satgas akan melayani mantan nasabah DF sejak tanggal 23 Juni 2011 dan berakhir pada tanggal 05

Juli 2011. Pelaporan nasabah sebagaimana ditulis dalam pengumuman tersebut, dibuka pada hari kerja dari pukul 09:00 hingga 15:00 WIB. Dan bagi nasabah DF yang ingin melapor dapat mendatangi Sekretariat Satgas, dan kantor JFX.

Dengan membawa bukti sebagai mantan nasabah DF, Satgas akan memetakan dan memverifikasi klaim nasabah Discovery yang bertransaksi melalui kantor pusat DF baik di Jakarta maupun kantor cabang resmi di Bandung dan Makassar. ▲

Nasib LDP-SRG Tunggu Sikap Kemenkeu

Panja DPR amandemen UU No.9/2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) masih menunggu sikap Kementerian Keuangan terkait usulan penyertaan dana modal awal lembaga dana penjaminan sistem resi gudang (LDP-SRG) sebesar Rp 1,5 triliun.

Ketua Komisi VI DPR, Erlangga Hartarto, mengatakan, pihaknya akan sesegera mungkin bertemu dengan Kementerian Keuangan untuk membicarakan hal tersebut dan memutuskan berapa besar penyertaan modal pemerintah.

"Sampai dengan saat ini, jumlah usulan terhadap pemerintah untuk penyertaan dana modal

awal masih menjadi pembahasan Panitia Kerja DPR RI amandemen UU No.9/2006 tentang SRG," kata Erlangga.

"Dalam waktu dekat kembali akan dilakukan rapat untuk membahas modal awal lembaga tersebut. Mudah-mudahan cepat didapatkan kesimpulan, sehingga usulan kepada Kemenkeu segera direspon," jelas Erlangga Hartarto.

Sementara itu, Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, mengatakan lembaga penjaminan diperlukan dalam SRG terutama ketika terjadi default atau kegagalan pengelola gudang dalam penyelesaian transaksi resi gudang. "Lembaga ini juga dapat berperan

sebagai penjaminan kepercayaan bagi perbankan untuk mengucurkan pembiayaan resi gudang."

"Kami bersama Panja Komisi VI DPR, masih menyamakan persepsi pihak mana yang dapat menjadi lembaga penjaminan. Sementara ini ada usulan dari perusahaan BUMN yang dapat berperan sebagai lembaga jaminan SRG," ujar Syahrul.

Adapun mengenai dana penyertaan modal awal, menurut Syahrul, Panja dan Bappebti masih mendalami usulan modal awal senilai Rp1,5 triliun. "Angka itu masih menjadi pembahasan. Jadi belum final," katanya. ▲

Izin PT Danareksa Futures Dicabut

Bappebti diawal tahun 2011 telah membekukan izin usaha PT Danareksa Futures sebagai pialang berjangka anggota Jakarta Futures Exchange (JFX). Pembekuan izin usaha tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 1206/Bappebti/SA/01/2011.

Saat izin usaha pialang ini bekukan, Danareksa diberi kesempatan selama 90 hari untuk membenahi internal. Namun, hingga waktu yang ditentukan Danareksa

tetap tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Sehingga, pada tanggal 23 Juni 2011, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 1353/BAPPEBTI/SA/06/2011, izin usaha PT Danareksa Futures, resmi dicabut.

Selain itu, dari investigasi yang dilakukan Tim Bappebti, diketahui PT. Danareksa Futures sudah tidak aktif dan tidak lagi melakukan kegiatan sesuai dengan fungsinya sebagai pialang Berjangka. Oleh karena itu, Bappebti mencabut

izin usaha perusahaan pialang ini. Keputusan itu dilandasi Pasal 85 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9/1999, tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, dinyatakan, izin usaha Pialang Berjangka berlaku selama Pihak tersebut masih aktif melakukan kegiatan usahanya. ▲

Permintaan Emas Batangan Naik 50 %

Permintaan emas batangan di dalam negeri pada tahun 2011 ini diperkirakan tumbuh lebih dari 50 % dibandingkan tahun lalu. Hal itu seiring beralihnya pola investasi masyarakat ke jenis investasi aman. Di sisi lain, permintaan emas perhiasan pun ikut mengalami kenaikan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Perhiasan Emas Indonesia (APPEI), Leo Hadi Loe, mengatakan, permintaan emas baik berupa batangan untuk keperluan investasi maupun emas perhiasan meningkat pesat pada tahun ini. "Diperkirakan konsumsi emas batangan di dalam negeri untuk semester pertama tahun ini tumbuh 50 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan permintaan emas perhiasan diproyeksikan naik 20 % pada semester pertama 2011."

"Tren ini dapat berlanjut ter-

us hingga akhir semester berikutnya," ujar Leo, baru-baru ini.

Sementara itu, Vice President Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk, Herman, mengatakan, angka penjualan selama tahun 2011 berjalan telah hampir menyamai penjualan sepanjang tahun lalu. Dan, diperkirakan penjualan emas batangan dapat melonjak lebih dari 50 %.

"Sepanjang Januari - Mei 2011, Antam telah menjual lebih dari 17.000 kg emas batangan. Jumlah tersebut hampir menyamai total penjualan emas batangan sepanjang 2010 yang mencapai 18.000 kg," jelas Herman.

Mengacu kondisi tersebut, Herman memperkirakan penjualan emas batangan sampai dengan akhir tahun ini dapat naik setidaknya sampai dengan 25.000 kg.

"Emas ini tidak seperti ba-

rang lainnya di mana ketika harga tinggi permintaan akan turun. Permintaan emas justru meningkat pesat seiring kenaikan harga. Hal itu karena masyarakat menilai emas sebagai investasi yang aman sehingga beralih dari jenis investasi lainnya," katanya.

lebih jauh diutarakan Herman, Antam fokus pada pembuatan emas batangan karena jenis produk tersebut tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPn) yang dapat membebani konsumen. Sementara itu emas dalam bentuk koin akan dikenai PPn yang biasanya dibebankan kepada konsumen. Adapun jenis emas perhiasan berpotensi mengalami depresiasi nilai seiring pergeseran mode desain yang dapat menyebabkan harga sedikit turun.

"Pembeli emas batangan kami umumnya berasal dari toko emas dan individu," ujarnya. ▲

Pasokan Beras Global Naik

Harga beras di pasar internasional diperkirakan akan mengalami penurunan setelah terjadinya peningkatan pasokan di negara-negara produsen. Meningkatnya pasokan tersebut melebihi permintaan dan pada akhirnya meningkatkan stok.

Demikian antara lain proyeksi Food and Agriculture Organization (FAO) sebagaimana diungkapkan pada Food Outlook 2011. Dalam laporan FAO itu, disebutkan pasokan pasar global akan naik sekitar 1,8 % menjadi 463,8 juta metrik ton pada 2010-2011. Sementara permintaan beras di pasar global sekitar 459,6 juta ton.

"Pasokan beras dunia tampak berlimpah dan lebih dari cukup untuk memenuhi permintaan dunia," jelas Concepcion Calpe, ekonom senior di Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) kepada

Bloomberg, baru-baru ini.

Menurut Calpe, beras merupakan makanan pokok separuh penduduk dunia, juga sumber makanan utama bagi kelompok miskin yang menghabiskan separuh pendapatan untuk bahan pangan.

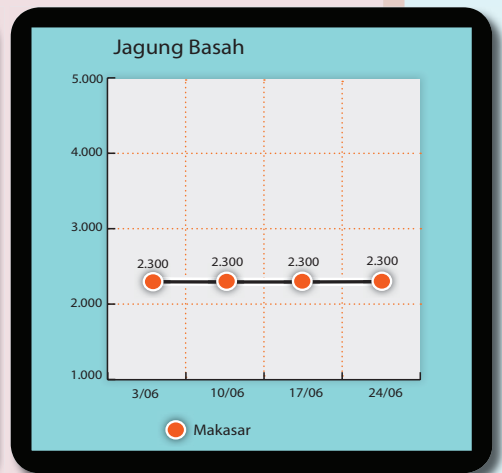
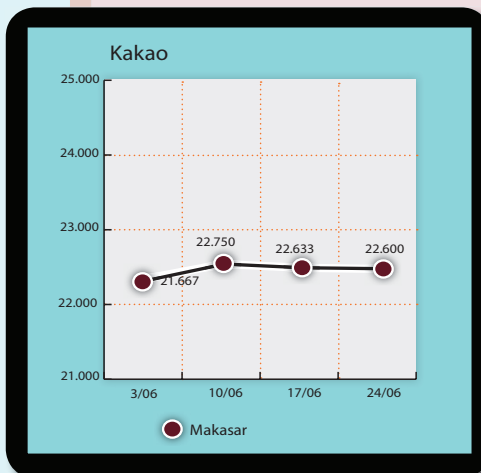
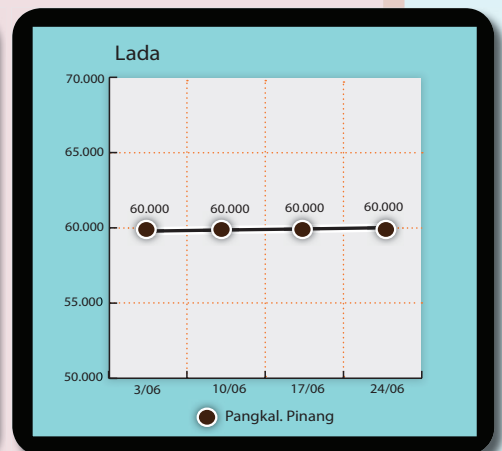
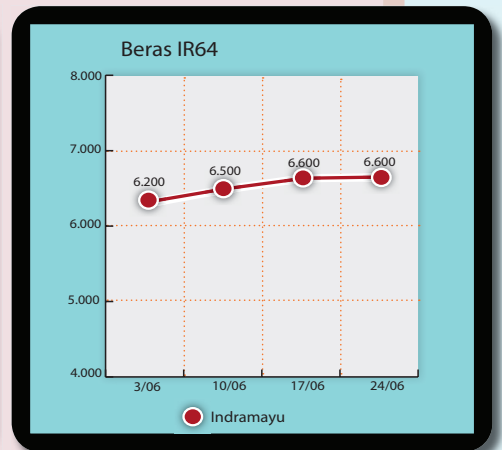
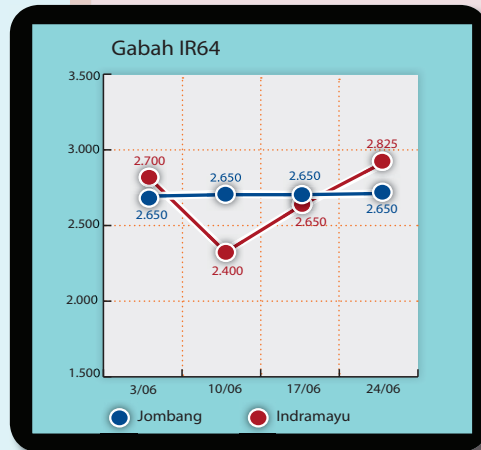
"Harga yang lebih rendah akan membantu mengurangi harga pangan global yang melonjak ke rekor pada Februari 2011 lalu, dan membuat bank sentral berada di bawah tekanan menaikkan suku bunga untuk mengatasi percepatan inflasi.

Sementara itu, harga beras di bursa berjangka Chicago telah naik 27 % selama tahun 2010 lalu, tertinggal oleh jagung yang telah melonjak 73 % dan gandum yang naik 48 %. Di sisi lain menurut Calpe, ancaman kenaikan harga beras justru datang dari produsen utama

dunia yakni Thailand. Diperoleh informasi, bahwa pemerintah negeri gajah putih ini akan membeli beras di pasar global seharga 15.500 baht atau setara 490 dolar Amerika. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan biaya ekspor dan meningkatkan permintaan ke sekitar US\$750 per ton.

"Di pasar global, setiap perubahan dalam kebijakan beras di negara produsen Thailand dan Vietnam, dapat mendorong harga lebih tinggi," ujar Calpe. Sebab Thailand dan Vietnam, tambah Calpe, merupakan eksportir terbesar yang mewakili sekitar setengah dari perdagangan global beras. Dan, menurut proyeksi pemerintah kedua negara, diperkirakan memiliki panen gabah akan lebih besar lagi di tahun 2011, ini. ▲

Harga Komoditi (Rp/Kg)



Tea Tree Oil

Warisan James Cook

Kayu Putih, atau dalam bahasa Latin tanaman ini dikenal melaleuca leucadendra. Tanaman ini cukup banyak ditemukan di wilayah Asia Tenggara dan daratan Australia. Karena melaleuca leucadendra dengan mudah tumbuh di dataran rendah, tanaman ini kerap pula dianggap sebagai musuh petani. Namun, tanaman yang tergolong semak ini banyak memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Mulai dari akar hingga daun, bisa digunakan sebagai bahan pengobatan dan kosmetik.

Di daratan Australia, minyak Kayu Putih juga dikenal sebagai minyak pohon teh- tea tree oil. Penduduk asli Australia, Aborigin dari Pantai Utara, New South Wales, menggunakan daun Kayu Putih untuk merawat luka teriris, terbakar, gigitan serangga dan infeksi kulit.

Legenda lain dari Australia, ketika Kapten James Cook, penjelajah ulung berkebangsaan Inggris ini

berhasil menginjakkan kakinya di Australia, memberi nama bagi Kayu Putih sebagai tea tree atau pohon teh. Hal itu diabadikan James Cook, karena daun Kayu Putih digunakan pasukannya sebagai seduhan teh. Sebab, manfaat yang dirasakan para pasukan James Cook, dapat menyegarkan tubuh dan meningkatkan stamina. Karena itu juga, dalam beberapa kesempatan selama di Australia, James Cook mengoplos daun Kayu Putih ke dalam cairan bir. Hal itu dilakukan agar menambah aroma bir dan menghangatkan tubuh.

Kisah yang ditinggalkan James Cook, tersebut, kemudian diwariskan pula dengan angkatan perang Australia. Tentara Australia yang ikut bertempur pada zaman Perang Dunia I, seluruh pasukan dibekali tea tree oil. Minyak Kayu putih itu semula diperuntukan sebagai disinfektan, antiseptik dan pengusir rasa neyeri.

Sejak angkatan perang Australia

banyak menggunakan minyak Kayu Putih, maka pamor dan permintaan bahan baku Kayu Putih semakin tinggi. Dan, kalangan akademisi pun mulai melakukan berbagai penelitian manfaat dan kegunaan Kayu Putih.

Sementara itu, cerita para leluhur kita pun banyak yang menggunakan Kayu Putih untuk berbagai perawatan kulit dan penyakit. Dalam pengobatan tradisional nusantara, Kayu Putih antara lain digunakan untuk penyembuhan batuk, sakit perut, penyakit kulit, dan aromaterapi.

Di Indonesia tanaman Kayu Putih pada umumnya berupa hutan alam dan hutan buatan. Hutan alam Kayu Putih pada umumnya terdapat di Kepulauan Maluku, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Sedangkan hutan buatan tanaman Kayu Putih terdapat di Jawa Timur (Kabupaten Ponorogo, Kediri, dan Madiun), Jawa Tengah (Kabupaten Sala, Gundih, Grobogan, dan Purwodadi), Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beberapa wilayah di Jawa Barat.

Pohon kayu putih mampu tumbuh sampai ketinggian 45 kaki. Pohon tanaman ini sangat kuat dan mempunyai ketahanan yang bagus, serta dapat mematenkan tanaman lainnya dan tidak dapat dimusnahkan dengan cara menebang atau membakar.

Di Pulau Buru dan Seram, daun Kayu Putih dalam jumlah besar dapat diperoleh dari semak dan pohon kayu putih yang tumbuh liar, sehingga pohon-pohon tidak perlu dibudidayakan. Hutan-hutan kayu putih sering mengalami kebakaran, namun dapat segera tumbuh kembali.

Tanaman Kayu Putih yang umurnya telah mencapai 4-5 tahun umumnya sudah dapat dipungut daunnya untuk disuling. Setiap jarak waktu 6-12 bulan (beberapa tempat diijinkan 6 bulan) Kayu Putih sudah dapat dipungut daun-

nya lagi. Potensi produksi daun Kayu Putih rata-rata per-hektar di perkirakan 1,5-2,4 ton atau rata-rata 2,0 ton.

Minyak atsiri dari hasil penyulingan daun Kayu Putih dikenal dengan nama minyak Kayu Putih. Selain daun segar, rantingnya pun bisa disuling. Beberapa jenis Melaleuca yang mampu menghasilkan minyak kayu putih antara lain Melaleuca leucadendron Linn, Melaleuca cajeputi Roxb dan Melaleuca viridiflora. Kandungan utama minyak kayu putih adalah cineol. Kualitas minyak Kayu Putih ditentukan oleh kadar cineol, makin besar kadar cineol-nya kualitasnya pun makin tinggi.

Saat ini, permintaan pasar domestik minyak Kayu Putih dipenuhi dari Perum Perhutani, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi DIY, industri rakyat di Kepulauan Maluku, dan beberapa daerah lainnya. Setiap tahunnya terdapat kekurangan minyak Kayu Putih, sekitar 1.000 ton. Selama ini kekurangan tersebut dicukupi dengan mengimpor minyak eucaliptus dari Cina. Hal ini mengindikasikan bahwa peluang untuk pengembangan industri minyak Kayu Putih di dalam negeri masih terbuka lebar.

Tahun 2001 - 2003, produksi minyak Kayu Putih di Indonesia menurun 85,1 % dari sebelumnya. Namun sejak tahun 2005, produksinya kembali mengalami peningkatan sekitar 760 %. Meski mengalami peningkatan produksi, Indonesia saat ini tergolong salah satu negara pengimpor minyak Kayu Putih terbesar di dunia. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, industri mengimpor dari Cina dan Vietnam.

Sebagai komoditi ekspor, minyak Kayu Putih pantas mendapat perhatian dan dikembangkan di nusantara. Sehingga budaya leluhur menggunakan Kayu Putih sebagai pengobatan alternatif tetap terpelihara. ▲

Ampuh Untuk Perawatan Kulit

Departemen Kesehatan Australia pada tahun 1949 secara resmi memperkenalkan dan menerbitkan artikel yang mengkaji kualitas Kayu Putih atau tea tree oil. Dalam kajian itu, diutarakan minyak Kayu Putih bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh. Minyak ini juga menyembuhkan, anti-radang, deodoran, expectorant (pereda dahak) dan balsam. Serta, dapat digunakan sebagai anestesi lokal yang ringan.

Beberapa penyakit kulit dan penyakit bagian dalam yang dapat disembuhkan dengan menggunakan minyak Kayu Putih, sebagai berikut;

1. Kulit Berjerawat dan berminyak: Untuk menangani jerawat secara langsung, minyak harus dicairkan antara 5 dan 15%, jika tidak, dapat dilakukan dengan menambahkan beberapa tetes minyak pada air yang digunakan untuk membasuh.
2. Vaginitis, direkomendasikan menggunakan 30 tetes dalam satu liter air, penggunaannya dengan cara membasuh vagina.
3. Luka infeksi atau kutu air, dengan mengkompres yang diberi 3 - 8 tetes minyak Kayu Putih, dicampur dengan setengah liter air.
4. Untuk herpes, sengatan serangga, dan jamur pada kaki, dapat digunakan tanpa dicairkan. Dalam hal ini, seharusnya dipakai sekedarnya pada area kecil, sedikitnya dua kali sehari pada area kulit atau kuku yang terinfeksi.
5. Sariawan yang parah atau bisul, kumur dengan satu gelas air hangat yang mendidih dan dibubuhkan antara 5 - 10 tetes oil.
6. Kelainan saluran pernafasan dapat dibubuhkan antara 5 - 15 tetes dalam mangkuk air panas dan dihirup uap panasnya antara 5 - 10 menit.
7. Untuk mengurangi bronkitis, seperti halnya sakit asma dan flu, dapat dilakukan dengan berendam di bath tub (bubuhkan hingga 7 tetes pada air hangat-hangat kuku tanpa menggunakan sampo atau sabun yang berlebihan), atau dikompreskan di atas dada. Infeksi juga dapat dilakukan melalui terapi bath tub atau uap air.
8. Mengatasi sejumlah penyakit rematik direkomendasikan untuk membubuhkan 30 tetes minyak kental yang dicairkan ke dalam 50 ml minyak nabati, dan oleskan pada daerah yang sakit, seka 2 - 3 kali per hari.



Selain itu, minyak Kayu Putih bisa digunakan dalam bidang kosmetik. Kita dapat menciptakan krim Tea Tree sendiri dengan menambah porsi krim netral, 5 - 15 tetes oil. Krim ini membantu kita mengurangi iritasi dan memberi kehalusan dan elastisitas pada kulit, ideal untuk kulit sensitif dan iritasi.

Jika ingin menghilangkan kutil yang mengganggu, kita dapat memakai tetes minyak kayu Putih dan satu tetes minyak jeruk secara langsung ke kutil sepanjang malam dan balut dengan kain kasa tipis atau kapas, yang harus dibuka di pagi harinya. Ulangi cara ini setiap malam dan dalam tiga atau empat minggu kita dapat melupakan kutil yang mengerikan itu.

Juga berkaitan dengan rambut kita, dengan mengatur aktivitas kelenjar yang ditemukan di bawah kulit, fungsinya untuk membantu melicinkan kulit, bisa menghindari rambut terlalu berminyak dan rambut kering. Untuk melakukannya dapat membeli sampo yang telah berisi oil ini atau kombinasikan penggunaan tiap hari dengan beberapa tetes essential oil dari minyak Kayu Putih. Di samping itu sangat efektif melawan ketombe.

Membasmi kutu rambut. Letakkan pada tangan sampo yang akan digunakan untuk mencuci rambut dan tambahkan empat tetes minyak Kayu Putih, kemudian basuh seperti biasa. ▲

FIRST QUARTER OF NON-OIL EXPORT IS EXCEEDING THE TARGET

Indonesian non oil export performance in 2011 first quarter shows a convinced growth and exceeds the set target. The total of non oil export in last April reached US \$ 12.9 trillion therefore the total of non oil export for the first four months this year has reached US \$ 50.3 trillion, or 29.3 % higher than the same period in 2010. This figure is exceeding the government annual target of 12 % - 15 %.

"The growth of export figure in April 2011, is the highest figure compare than the export figure in April on the past years. In the other hand, the non oil export figure to main country destination such as China, USA, Japan and European Unity including ASEAN market is increasing intensively," that's one of the things said by The Trade Minister Mari Pangestu in the beginning of June 2011 at the press conference on Trade Ministry export - import performance.

Based on the destination country, the non oil export to ASEAN market in

last April reached US \$ 2.468,9 Million, therefore the total from January - April 2011 has reached US \$ 8.261,5 Million. Or 34.65% higher compared with the same period in 2010. In the second position, the export to China in April 2011 reached 1.565,5 Million with the total export to this country from January - April 2011 has reached US \$ 4.017,5 Million or increased for 21.39%.

Meanwhile, the non oil export to Japan in last April reached US \$ 1.458,5 Million, or in other words it reached US \$ 4.932,5 Million on the 2011 first quarter. This export figure is 18.16% higher compared with the same period in 2010.

Whilst the export to USA in April 2011 reached US \$ 1.314,4 Million, therefore the total of first quarter export to this country has reached US \$ 4.053,3 Million or 24.53% higher compared with the same period in 2010.

"Those figures in the same time is giving us signal or information that it's not

only external market is getting better especially in Asia but the result of Free Trade Agreement or Economic Partnership Agreement cooperation is become more effective in supporting our non oil export," Mari Pangestu explained.

Beside the promising export growth, according to Mari, another great growth is that more Indonesian export products were using the entrance fee remission at the destination country. It's proven from regional offices tabulation that published the Certificate of Origin.

"The usage of entrance fee remission to destination countries is expected to increase market access for our export product. This is the positive impact from FTA and EPA cooperation," Mari Pangestu concluded. ▲

MARI ELKA PANGESTU: BE CAUTIOUS OF RICE PRICE INCREASE

The end of grain harvest period in production centrals for period of February - May 2011, created the rice price increase. Trade Ministry data showed that the estimate price for medium rice in June 2011 is on the level of Rp. 7.107 per kg, exceedingly increased from May 2011 estimate for Rp. 7.040 per kg.

The Trade Minister Mari Elka Pangestu, added, that the rice price increase is triggered by the end of harvest season in some production central region. Meanwhile, the next harvest will start by the end of June or July, Mari said while giving press statement on staple food price development, at The Ministry of Trade, in June 2011.

The indication of rice price increase also can be seen from the declining of rice supply since last May 2011. Even

in June, the rice estimate supply in Cipinang rice main market is still lower than the rice estimate supply on the same period last year. The rice estimate supply in June 2011 is 2.350 tons per day. Whereas on the same period in 2010 is reached 2.507 tons per day.

"June 2011 supply is lower than in 2010, it's caused by harvest season delay. In June 2011 there's harvest therefore the supply is bigger," Mari explained.

In regards to the grain harvest season development, Mari Pangestu notifies consumer to be cautious of rice price increase as the next harvest season will not be as big as the last February - May harvest season.

"Therefore, in the future we need to control the rice stock, especially towards the feast season & led also the

bad season. With the rice stock control we can push the price. Therefore the rice price increase since May is only for a while." Mari Pangestu explained. ▲

WEFP CONCRETE OF 20:20:20

The 2011 World Economic Forum of East Asia is officially opened by Indonesian President, Susilo Bambang Yudoyono, in Jakarta, on the 12th of June 2011. The 20th International Forum that held in Jakarta for the first time, is attended by 624 participants that represent government agencies, industry, regional and global policy makers and the head of nonprofit agencies and academics.

One of the initiatives that is launched in the 2011 World Economic Forum of East Asia is the partnership with World Economic Forum for the sustainable agriculture in Indonesia - *World Economic Forum Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (WEFP-ISA)*. This partnership is in the form of information changes & initiative implementation series to establish sustainability principal or the sustainability for agriculture growth that can help to actualize food

security, environmental sustainability and economic opportunity for all agriculture sector stakeholders.

"This partnership has concrete target which is 20:20:20. Which means, enhancement of agriculture product of 20%, emission reduction of 20% and poverty level reduction in rural area of 20%," Economical Coordinator Minister, Hatta Radjasa explained.

"The Agriculture sector is an important sector for Indonesia and we are keen of WEF and business world initiative to run public private partnership on agricultural sector in Indonesia. This thing is consistent with government program to increase productivity and investment on agricultural sector," Hatta Radjasa continued.

"We are very keen to hold The 2011 World Economic Forum of East Asia in Jakarta. The uniqueness of The World Economic Forum of East Asia is the

series of initiatives, partnerships, and agreement that are achieved between participants from agencies and companies," Hatta Radjasa explained.

Besides the agricultural sector initiative, Indonesian delegation was taking a part in discussing the growth of investment on communication infrastructural sector including digital media sector. The participants from outside Indonesia that participate in the discussion on media digital was including Yahoo!, UBM India, ABS-CBN, Facebook, and The Internet Society. Indonesian delegation is represented by Visi Media Asia, Para Group and First Media. ▲

NATIONAL COCOA & CHOCOLATE INDUSTRY RESSURECTION

Trade Minister Deputy Mahendra Siregar, expressed, that with the existence of 14 chocolate industries chain that has just been developed in Indonesia will increase Indonesian position in raw materials supply chain as well as processed cocoa in world market.

Thus, one of the things, expressed by The Trade Minister Deputy Mahendra Siregar on the declaration of "National Cocoa & Chocolate Industry Resurrection" at Ceres Pty Ltd (General Food Industries Pty Ltd) Bandung, West Java on the 24th of June 2011.

"The Trade Ministry will run the government policy in the downstream sector functions, which are distribution, market security and world cocoa market network," Mahendra said.

Furthermore, he added that government will continually support the improvement program of cocoa beans

quality, increase the volume of cocoa bean fermentation, and certification of products for sustainable cocoa.

The declaration of "National Cocoa & Chocolate Industry Resurrection" was opened by The Minister of Industry, M.S. Hidayat, and was attended by some First & Second Echelon of Trade & Industrial Ministry, The Trade Ministry export director of Agricultural & Forestry product, Department assistance of Economical Coordinator Minister of Plantation and Horticultural Affairs, Regional secretary of West Java Province and The Chief of Cocoa Association - AIKI, APIKCI, AFKI.

The Ministry of Industry M.S Hidayat on the same occasion inaugurated 14 cocoa processing factories in some location throughout Indonesia. There are 8 inaugurated factories for capacity addition; General Food Industries Pty Ltd, Bumi Tangerang Mesindotama Pty

Ltd, Cocoa Ventures Indonesia Pty Ltd, Freyabadi Indotama Pty Ltd, Gandum Mas Kencana Pty Ltd, Teja Sekawan Cocoa Industries Pty Ltd, Kakao Gemilang Pty Ltd and Sekawan Karsa Mulia Pty Ltd.

There are 6 factories with new facility; Asia Cocoa Indonesia Pty Ltd (Foreign Investment), Maju Bersama Cocoa Industries Pty Ltd, Budidaya Kakao Lestari Pty Ltd, Jaya Makmur Hasta Pty Ltd and Unicom Kakao Makmur Sulawesi Pty Ltd. ▲

Beberapa Pengertian Kontrak Derivatif Lainnya

Bagian II

*) Alfons Samosir, Kepala Biro Hukum, Bappebti

KONTRAK DERIVATIF LAINYA (OTHER DERIVATIVES)

Sebagaimana dijelaskan pada edisi sebelumnya, bahwa pengertian derivative (tanpa "s") dengan derivatives (dengan "s") adalah sama di mana dasar penentuannya adalah "underlying asset atau komoditi". Adanya kata-kata "ther" pada "other derivatives" (dengan "s") menunjukkan perkembangan perdagangan bursa berjangka dan OTC sangat pesat yang tidak hanya menyangkut masalah transaksinya, tetapi underlying asset dan komoditi sebagai dasar dari munculnya jenis jenis kontrak derivatives lainnya.

Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa derivative (tanpa "s") terbagi dalam dua bagian. Yaitu, *forward based derivative* adalah *other derivatives*. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa *forward* atau *options* juga bisa menghasilkan derivatives lainnya.

Dalam buku "Options, Futures and Other Derivatives - Sixth Edition, karangan John C. Hull, terdapat berbagai jenis derivatives (dengan "s"), antara lain, *credit derivatives*, *weather derivatives*, *energy derivatives*, *insurance derivatives*, *interest rate derivatives*.

Dari penjelasan di atas, pada dasarnya penggunaan istilah "Kontrak Derivatif Lainnya" dimaksudkan untuk memasukan jenis-jenis Kontrak Derivatif yang tidak termasuk Kontrak Berjangka dan Kontrak Opsi.

Kontrak Derivatif lainnya bukanlah merupakan pengertian yang berdiri sendiri, melainkan dipergunakan untuk penyebutan bagi kontrak-kontrak derivatif yang tidak termasuk ke dalam kategori kontrak derivatif yang telah dikenal pada umumnya yaitu kontrak berjangka (futures) dan kontrak opsi (options).

Di dalam *textbook* sebagaimana disebutkan di atas, tidak terdapat definisi yang menjelaskan pengertian Kontrak Derivatif lainnya. Karena Kontrak Derivatif lainnya merupakan dari pengertian Kontrak Derivatif sebagai mana disebutkan di atas. Termasuk dalam pengertian Kontrak Derivatif lainnya antara lain kontrak *forward* dan kontrak *Swap*.

Untuk menjaga fleksibilitas pengaturan terhadap seluruh Kontrak Derivatif, pada dasarnya Kontrak Derivatif lainnya - Other Derivatives (dengan "s") tidak perlu didefinisikan. Atau, apabila didefinisikan tidak membatasi ruang lingkungannya. Namun demikian, untuk memenuhi permintaan dalam rangka rapat pembahasan rancangan undang-undang (RUU) amandemen Perdagangan Berjangka Komoditi di Panja DPR RI, berikut ini dicoba dirumuskan beberapa pengertian atau definisi derivatif lainnya - other derivative[s], sebagai berikut;

1. Alternatif 1:

Kontrak Derivatif Lainnya adalah kontrak selain Kontrak Berjangka dan/atau Opsi yang nilai dan harganya tergantung pada subjek Komoditi (underlying)

Penjelasan:

Definisi alternatif 1 ini paling tepat dan simple karena UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang PBK telah mendefinisikan dan mengatur kontrak Derivatif yang berbentuk Kontrak Berjangka dan Opsi sehingga untuk memperluas jenis cakupan Kontrak Derivatif lainnya yang belum diatur sebelumnya maka definisinya cukup menyebutkan "selain Kontrak Berjangka dan/atau Opsi".

2. Alternatif 2:

Kontrak Derivatif Lainnya, adalah kontrak standar selain Kontrak Berjangka dan/atau Opsi yang nilai dan harganya tergantung pada subjek Komoditi.

Penjelasan:

Definisi alternative 2 sama dengan definisi alternative 1 hanya menambahkan persyaratan bahwa Kontrak Derivatif Lainnya harus berbentuk kontrak standar. Hal ini

dimaksudkan agar setiap kontrak yang akan diperdagangkan dapat diatur dan diawasi sesuai dengan ketentuan sehingga perlindungan pada masyarakat lebih terjamin.

3. Alternatif 3:

Kontrak derivatif Lainnya adalah kontrak standar selain Kontrak Berjangka dan/atau Opsi yang nilai dan harganya tergantung pada subyek Komoditi, dengan penarikan margin yang diperdagangkan secara multi-lateral dan/atau secara bilateral.

Penjelasan:

Definisi alternatif 3 lebih lengkap daripada alternatif 1 dan alternatif 2 karena selain memenuhi unsur kontraknya yang standar, juga menambahkan unsur penarikan margin dan mekanisme transaksinya yaitu dapat secara multilateral maupun bilateral.

4. Alternatif 4:

Kontrak Derivatif Lainnya adalah kontrak standar berbentuk kontrak *forward*, kontrak *swaps*, atau kontrak standar lainnya yang nilai dan harganya tergantung pada subjek komoditi, dengan penarikan margin yang diperdagangkan secara multilateral dan/atau secara bilateral, dengan penyelesaian kemudian dan tidak termasuk dalam pengertian ini adalah Kontrak Berjangka dan/atau Opsi.

Pejelasan:

Definisi alternatif 4 lebih lengkap daripada alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3, dengan menambahkan jenis-jenis kontrak derivatif lainnya yang telah ada dalam praktik saat ini seperti kontrak *swap* dan kontrak *forward* dan membuka jenis-jenis kontrak derivatif lain

yang kemungkinan akan diperdagangkan. Definisi ini dimaksudkan untuk mengakomodasi jenis-jenis kontrakderivatif apapun yang akan adadikemudian hari. Selain itu ditambahkan pula unsur “penyelesaian kemudian” sesuai dengan praktik yang ada penyelesaian kontrak derivatif dilakukan dimasa yang akan datang.

5. Alternatif 5:

Kontrak Derivatif Lainnya adalah kontrak standar berbentuk kontrak forward, kontrak swap, kontrak opsi atau kontrak standar lainnya yang nilai dan harganya tergantung pada subjek Komoditi, yang diperdagangkan dengan penarikan marjin secara multilateral dan/atau secara bilateral dengan penyelesaian kemudian dan didaftarkan di Lembaga Kliring Berjangka untuk dijamin penyelesaiannya dan tidak termasuk dalam pengertian ini adalah Kontrak Berjangka.

Penjelasan:

Definisi alternatif 5 ini lebih lengkap daripada alternatif 1,2,3, dan 4 dengan menambahkan persyaratan bahwa seluruh transaksi Kontrak Derivatif Lainnya wajib didaftarkan di Lembaga kliring Berjangka untuk di jamin penyelesaiannya. Hal ini untuk menjamin kepastian bagi para pihak bahwa tidak akan terjadi wanprestasi karena ada pihak yang menjamin dan mengkliringkan transaksi serta menjaga integritas keuangan yaitu Lembaga Kliring Berjangka. Sehingga keawatiran kita bahwa pengaturan kontrak derivatif lainnya kedalam RUU Perubahan Atas UUPBK akan mengakibatkan masyarakat dan negara dirugikan tidak akan terjadi karena kontrak derivatif lainnya yang dapat diperdagangkan harus memenuhi unsur-unsur:

kontraknya harus standar; wajib didaftarkan di Lembaga Kliring Berjangka untuk dijamin penyelesaiannya; mekanisme perdagangan dapat dilakukan secara multilateral dan atau secara bilateral; jenisnya dapat berbentuk kontrak forward, kontrak swap, kontrak opsi atau kontrak standar lainnya yang nilai dan harganya tergantung pada subjek Komoditi.



Tulisan ini mengacu pemikiran dan pandangan para pakar industri perdagangan berjangka komoditi yang dituangkan pada buku, sebagai berikut;

1. Robert W. Kolb and James A. Overdahl, *Financial Derivatives*, edisi ketiga, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2003, halaman 1, menyebutkan “We define a derivative as a contract that derives most of its value from some underlying asset, reference rate, or index. As our definition implies, a derivative must be based on at least one underlying. An underlying is the asset, reference rate, or index from which a derivative inherits principal source of value. Falling within our definition are several different types of derivatives, including commodity derivatives and financial derivatives.”

2. Jhon C. Hull, *Options, Futures and Other Derivatives*, edisi keenam, Prentice Hall, New Jersey 2006, halaman 1, menyebutkan “A derivative can be defined as a financial instrument whose value depends on (or derives from) the values of other, more basic underlying variables. Very often the variables

underlying derivatives are the prices of tradet assets. A stock option, for example, is a derivative whose value is dependent on the price of a stock. However, derivatives can be dependet om almost any variable, from the price of hogs to the amount of snow falling at a certain ski resort]”

3. Prof. Andrew M. Chiholm, *Derivatives demystified, A Step-by Setep Guide to Forwards, Futures, Swaps and Options*, John Wiley & Sons Ltd, West Sussex, England 2004, halaman 1, menyebutkan A derivative is an asset whose value is derived from the value of some other asset, known as the underlying”

4. Joe Duarte MD, *Futures and Options for Dummies*, Wiley Publishing, Inc New Jersey 2006, halaman 48, menyebutkan “A derivative is a financial instrument that gets its value not from its own intrinsic value but rather from the value from the underlying security and time”. ▲

(Selesai)

MEMILIH KONTRAK BERJANGKA MURABAHAH

Dalam buku-buku Islam (fiqh, tafsir dan hadits) menurut pakar ekonomi Islam dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEII) Agustianto, kita bisa melihat dan menganalisa definisi riba. Dari ratusan definisi riba itu disimpulkan, bahwa riba ialah aziyadah lam yuqabilha 'iwadh, artinya, riba adalah tambahan yang diperoleh tanpa didasarkan adanya 'iwadh.

Iwadh ialah transaksi bisnis riil yang terdiri dari tiga macam, yaitu jual-beli, bagi hasil dan ijarah. Jual-beli contohnya ialah seperti jual-beli dengan segala macamnya (jual-beli murabahah, salam, istisna). Transaksi bisnis riil juga dapat diwujudkan dengan bagi hasil dan ijarah.

Bagi hasil diwujudkan dengan konsep murabahah, syirkah, mudharabah musytarakah, musytarakah mutanaqishah dan muzara'ah. Sedangkan ijarah diwujudkan dengan ijarah biasa, ijarah muwazy (paralel). Sedangkan untuk transaksi mudharabah dan musytarakah serta transaksi jual-beli murabahah, salam, istisna' dan ijarah (leasing), memastikan keterkaitan sektor moneter dan sektor riil.

Oleh karena itu pula, salah satu rukun jual beli ialah ada uang ada ba-

rang (ma'kud 'alaihi). Dengan demikian, future trading dan margin trading yang tidak diikuti dengan penyerahan barang (fiscal delivery) adalah haram menurut Islam karena kurang memiliki persyaratan Syariah. Jelasnya bahwa konsep ekonomi Islam menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter.

Begitu pula dengan perbankan Islam yang pertumbuhan pembiayaannya tidak dapat terlepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Yang jelas tidak boleh ada tambahan (keuntungan) tanpa adanya transaksi bisnis riil. Seorang spekulan mata uang, yang meraup keuntungan dari selisih harga beli dolar dan jualnya, adalah pelaku riba. Dalam ekonomi Islam, uang tidak boleh dijadikan sebagai komoditi sebagaimana yang banyak dipraktikkan dewasa ini dalam kegiatan transaksi bisnis valuta asing.

Menurut Ekonomi Islam, transaksi valas hanya dibenarkan apabila digunakan untuk kebutuhan transaksi di sektor riil, seperti membeli barang untuk kebutuhan impor, berbelanja atau membayar jasa di luar negeri dan sebagainya. Jual-beli valas untuk kepentingan spekulasi, amat dilarang

dalam Islam. Jual-beli valas untuk kepentingan spekulatif menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.

Dampak spekulasi valas ialah nilai suatu mata uang dapat berfluktuasi secara liar. Solusinya adalah mengatur sektor finansial agar menjauhi dari segala transaksi yang mengandung riba, seperti transaksi-transaksi maya di pasar uang. Mengambil gain dan keuntungan tanpa didasarkan pada kegiatan bisnis sektor riil adalah riba, baik di pasar uang maupun di pasar derivatif. Maka seorang spekulan saham di pasar modal juga telah melakukan praktik riba, bahkan lebih jauh ia telah masuk kepada praktik gharar dan maysir. Demikian pula, seorang yang ikut dalam transaksi bursa berjangka komoditi tanpa didukung adanya penyerahan fisik atas barangnya juga telah melakukan praktek-praktek ribawi, karena ekonomi Islam tidak memisahkan sektor moneter dan sektor riil, maka jumlah uang yang beredar menurut Islam, ditentukan oleh banyaknya permintaan uang di sektor riil atau dengan kata lain, jumlah uang yang beredar sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa dalam perekonomian. Demikian

kata Ibnu Taymiah di buku Majmu' Fatawa pada abad pertengahan Islam.

Dalam Ekonomi Islam, sektor finansial mengikuti pertumbuhan sektor riil. Inilah perbedaan konsep ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu ekonomi konvensional, jelas memisahkan antara sektor finansial dan sektor riil. Akibat pemisahan itu, ekonomi dunia rawan krisis. Sebab, pelaku ekonomi tidak lagi menggunakan uang untuk kepentingan sektor riil, tetapi untuk kepentingan spekulasi mata uang. Spekulasi inilah yang dapat menggoncang ekonomi berbagai negara, apalagi negara yang kondisi politiknya tidak stabil. Akibat spekulasi itu, jumlah uang yang beredar sangat tidak seimbang dengan jumlah barang di sektor riil.

Spekulasi mata uang yang mengganggu ekonomi dunia, umumnya dilakukan di pasar-pasar uang. Pasar uang di dunia ini saat ini, dikuasai oleh enam pusat keuangan dunia (London, New York, Chicago, Tokyo, Hongkong dan Singapura). Nilai mata uang negara lain, bisa saja tiba-tiba menguat atau sebaliknya. Di pasar uang tersebut, peran spekulasi cukup signifikan untuk menggoncang ekonomi suatu negara. Lihatlah Inggris, sebagai negara yang kuat ekonominya, ternyata pernah sempoyongan gara-gara ulah spekulasi di pasar uang, apalagi kondisinya seperti Indonesia, jelas menjadi bulan-bulanan para spekulan. Demikian pula ulah George Soros di Asia Tenggara tahun 1997.

Bagi spekulasi, tidak penting apakah nilai menguat atau melemah. Bagi mereka yang penting adalah mata uang selalu berfluktuasi. Tidak jarang mereka melakukan rekayasa untuk menciptakan fluktuasi bila ada momen yang tepat, biasanya satu peristiwa politik yang menimbulkan ketidakpastian. Menjelang momentum tersebut, secara perlahan-lahan mereka membeli rupiah, sehingga permintaan akan rupiah meningkat. Ini akan mendorong nilai rupiah secara semu ini, akan menjadi makanan empuk para spekulasi. Bila momentumnya muncul dan ketidakpastian mulai merebak, mereka akan melepas secara sekaligus dalam jumlah besar. Pasar akan kebanjiran rupiah dan tentunya nilai rupiah akan anjlok. Para spekulasi meraup keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Makin besar selisihnya, makin menarik bagi para spekulasi untuk bermain.

Sebenarnya, sebagian pakar ekonomi dunia telah menyadari kerapuhan sistem moneter kapitalisme seperti itu. Teori bubble growth dan random walk telah memberikan

penjelasan yang meyakinkan tentang bahaya transaksi maya (bisnis dan spekulasi mata uang dan bisnis [spekulasi] saham di pasar modal).

Para pemimpin negara-negara G7 pun, telah menyadari bahaya dan keburukan transaksi maya dalam perekonomian. Pada tahun 1998 mereka menyepakati bahwa perlu adanya pengaturan di pasar uang sehingga tidak menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Jadi, bila negara-negara G7 telah menyadari bahaya transaksi maya, mengapa Indonesia masih belum melihat dampak negatifnya bagi perekonomian dan segera mendorong konsep dan blueprint Ekonomi Islam.

Selanjutnya, untuk meminimalisir kegiatan spekulasi dan bubble economy para ekonom Barat mengusulkan untuk mengetatkan regulasi investasi. Ben Bernake, Chairman of Federal Reserve bahkan sampai meminta kepada kongres Amerika Serikat untuk menyetujui penambahan regulasi bagi bank investasi agar tidak terjadi spekulasi yang berlebihan di pasar aset keuangan. Pendapat senada juga diutarakan oleh mantan Direktur IMF, Strauss-Kahn, yang mengatakan perlunya penambahan aturan dan transparansi untuk menghindari krisis yang lebih parah.

Meskipun kedua pernyataan ini terdengar berlawanan dengan semangat kapitalisme Amerika, namun akhirnya sebagian ekonom dan pengamat keuangan sepakat bahwa liberalisasi pasar keuangan cenderung mendorong kepada ketidakstabilan ekonomi.

Joseph Stiglitz, pemenang Hadiah Nobel 2002 dari Harvard University mengatakan, "Pada akhirnya, Amerika Serikat yang selama ini membanggakan sistem kapitalisme yang dianutnya ke berbagai negara di dunia, mendapat kritikan tajam setelah Amerika sendiri tidak mampu membuktikan bahwa model ekonomi yang dianutnya adalah model ekonomi yang bisa mensejahterakan umat manusia".

Berkaitan dengan hal tersebut, bursa berjangka seharusnya agar lebih cerdas memilih produk berjangka yang akan diluncurkan sebagai produk berjangka Murabahah. Sehingga kita tidak keliru dalam memilih produk sesuai dengan praktik-praktik murabahah yang memang dianggap relevan untuk saat ini.

Mengapa diperlukan hal tersebut, karena konsep ini dapat memberikan pencerminan kepada kita bahwa sistem perdagangan berjangka konvensional yang dilakukan selama ini terutama kontrak-kontrak berjangka derivatif seperti: indek, forex dan de-

derivatif lainnya yang diperdagangkan di luar bursa melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), ternyata belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai produk Murabahah karena belum memiliki unsur Syariah yang dipersyaratkan dalam Hukum Islam. Dan, cenderung bersifat Maysir, Gharar dan Riba.

Investor Muslimin

Sehubungan dengan hal itu, untuk memberikan alternatif pilihan investasi bagi investor muslimin yang menginginkan produk berjangka halal perlu diberikan alternatif pilihan investasi berjangka secara Syariah. Sehingga kalangan muslimin terhindar dari perbuatan Maysir, Gharar dan Riba. Untuk itu, agar kita tidak keliru memahami produk berjangka Syariah tersebut, diperlukan kajian para pakar ekonomi Islam untuk membahas hal tersebut agar kontrak berjangka Murabahah benar-benar sesuai dengan Syariat Islam. Maka diperlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Indonesia dalam menentukan produk Murabahah tersebut, sebelum mendapat persetujuan Bappebti.

Seperti halnya produk Syariah yang ada di perbankan, produk perdagangan berjangka murabahah tentunya tidak jauh berbeda dengan kontrak berjangka konvensional yang ada di bursa berjangka seperti produk komoditi primer, karena harganya kurang menarik dan tidak fluktuatif, serta transaksi perdagangannya tidak seliquid dan seramai kontrak-kontrak berjangka finansial dan indeks yang ada di SPA yang harganya jauh lebih fluktuatif. Itulah pilihan ekonomi kadang yang terbaik belum tentu diminati, akan tetapi kontrak derivatif yang cenderung haram menurut Islam lebih banyak diminati karena memang harga dan keuntungan sangat menarik.

Pertanyaannya adalah, apakah kontrak berjangka murabahah yang akan diperdagangkan tersebut mengambil konsep perdagangan berjangka (futures trading) dalam pengertian kontrak berjangka komoditi primer atau kontrak fisik forward, sebagaimana yang ada di bursa berjangka atau akad jual-beli antar perbankan dengan penyediaan komoditi di Bursa Berjangka.

Itulah yang perlu dikaji dan disosialisasikan terlebih dahulu, konsep murabahah seperti apa yang mau diperdagangkan di bursa berjangka agar kita semua mengerti tentang subyek kontrak murabahah tersebut dengan dasar hukum dan konsep yang jelas.

(Selesai) ▲

Ido Handika

Melesat Bak Pelor

Meniti karier di industri perdagangan berjangka komoditi bagi sekalangan orang bukan 'lah pilihan yang popular.

Tetapi bagi Ido Handika, profesi di bidang perdagangan berjangka merupakan tantangan yang menjanjikan masa depan karier cerah.

Betapa tidak, dalam tempo sekitar lima tahun dia sudah menduduki puncak tertinggi diperusahaannya, Direktur Utama PT Realtime Forex Indonesia (RFI).

Setelah menyandang gelar sarjana dari STT Telkom, tahun 2006, Handika, demikian dia disapa, langsung terjun bebas di perusahaan pedagang berjangka penyelenggara sistem perdagangan alternatif di bursa Jakarta Futures Exchange (JFX).

"Tidak lama setelah tamat kuliah, saya langsung mendapat tawaran kerja di perusahaan ini. Awalnya saya hanya coba-coba saja, tetapi pada akhirnya saya pun memutuskan untuk menekuni karier di bidang perdagangan berjangka ini," akunya.

"Sempat juga saya mendapat panggilan dari sebuah perusahaan telekomunikasi nasional terkemuka. Tetapi saya tolak. Karena rasanya sudah terlanjur menggeluti bidang perdagangan berjangka."

Lebih jauh diutarakan pria berkacamata kelahiran Jakarta, 1981, ini, posisi yang didudukinya itu bukan 'lah kursi kosong yang tanpa kerja keras. "Saya

masuk perusahaan ini kebetulan dalam membenahan sistem perdagangan yang menggunakan teknologi informasi. Karena bidang teknologi informasi itu saya pelajari di bangku kuliah, maka semua pekerjaan itu dengan mudah saya kerjakan bersama rekan yang ada di sini."

"Setelah sistem perdagangan berjalan dengan baik, maka saya pun diberi peluang untuk menguasai bidang-bidang lain di perusahaan ini," kisah Handika.

Saya pun cukup beruntung punya ayah, I Gde Rakatantra, yang sudah malang melintang di bidang perdagangan berjangka dan mantan staf Bappebti. Cukup banyak pengetahuan di bidang ini yang dapat saya serap dari beliau. Misalnya, langkah-langkah apa yang mesti saya ambil jika dalam posisi dilema, dan bagaimana cara saya membaca situasi, lalu bagaimana cara mengatasinya.

"Cukup banyak hal 'lah masukan dari beliau. Sehingga saya pun bisa menguasai transaksi perdagangan berjangka."

Menurut Handika, RFI saat ini sebagai pedagang penyelenggara SPA dari sebanyak sembilan perusahaan pialang berjangka anggota JFX. Dan diakuinya, mayoritas perusahaan pialang tersebut bertransaksi secara bilateral. Tetapi tahun 2010 lalu, ada transaksi pialang untuk kontrak berjangka Olein. Jumlahnya sekitar 50 lot.

Untuk melayani penawaran dari berbagai perusahaan pialang itu, Han-

dika, didukung sebanyak 20 SDM. "Karena perdagangan berlangsung 24 jam, maka kita berlakukan 3 shift. Jadi seperti saya ini, tidur di kantor sudah biasa untuk menemani karyawan."

"Sesungguhnya kami pun sangat berharap bisa bertransaksi secara multilateral. Tetapi karena kami merupakan perusahaan pedagang, sifatnya menunggu tawaran dari pasar, jadi kami pun menunggu perkembangan pasar dan ke arah mana industri ini akan bergerak," jelas Handika.

"Harapan saya, pasca amandemen UU No.32/1997, industri ini makin menunjukkan posisinya sebagai salah satu sarana investasi yang menjanjikan. Dan, berdampak pada sektor riil perekonomian nasional," tandasnya.

Anak sulung dari dua bersaudara ini, mengisi waktu kosongnya dengan menggeluti hobi menembak. Dia mengaku menjadi salah satu anggota dari Perbakin. Dan, menguasai tiga cabang menembak yakni dengan senjata laras pendek, senjata angin dan air soft.

"Belum ada prestasi yang bisa saya banggakan dari olah raga menembak ini. Tetapi, dengan menguasai teknik menembak, saya bisa mengontrol emosi, fokus dan penuh konsentrasi. Dan semua itu sangat membantu untuk pengembangan karier saya," tutur Handika, yang sudah mempersiapkan mengakhiri masa lajangnya dalam waktu tidak lama lagi.

